



LAPORAN KEUANGAN

2024
AUDITED

www.diskuk.jabarprov.go.id
Jl. Soekarno-Hatta No.705, Jatisari
Bandung

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pimpinan Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan Perangkat Daerah meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil adalah entitas akuntansi dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun 2024 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Neraca menyajikan informasi tentang posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.
2. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, dan Pembiayaan.
3. Laporan Operasional menunjukkan informasi Pendapatan-LO dan Beban.
4. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/(Defisit)-LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dan Ekuitas Akhir.
5. Catatan atas Laporan Keuangan memberikan uraian tentang kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Tahun 2024 ini masih belum

sempurna. Oleh sebab itu, kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Bandung, 23 Mei 2025

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil



Yuke Mauliani Septina, ST., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 197409261998032005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Lampiran.....	v
Pernyataan Tanggung Jawab.....	vi
Ringkasan	vii
Laporan Realisasi Anggaran.....	xii
Neraca	xiii
Laporan Operasional.....	xiv
Laporan Perubahan Ekuitas	xv
Catatan atas Laporan Keuangan.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	
1.3 Informasi Umum tentang Entitas Akuntansi	
1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN STRATEGIS, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD ...	
2.1 Ekonomi Makro	
2.2 Kebijakan Strategis	
2.3 Kebijakan Keuangan.....	
2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.....	
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target APBD	
3.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	
3.3 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan	
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	
4.1 Entitas Akuntansi	
4.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	

	4.4	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....
	4.5	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP.....
BAB	V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....
	5.1	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....
	5.1.1	Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran.....
	5.1.2	Penjelasan per Pos Laporan Realisasi Anggaran.....
	5.1.3	Catatan Penting Lainnya
	5.2	Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
	5.2.1	Penjelasan Umum Neraca
	5.2.2	Penjelasan per Pos Neraca
	5.2.3	Catatan Penting Lainnya
	5.3	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.....
	5.3.1	Penjelasan Umum Laporan Operasional
	5.3.2	Penjelasan per Pos Laporan Operasional.....
	5.3.3	Catatan Penting Lainnya
	5.4	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
	5.4.1	Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas
	5.4.2	Penjelasan per Pos Laporan Perubahan Ekuitas
	5.4.3	Catatan Penting Lainnya
BAB	VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI NON-KEUANGAN PD
BAB	VII	PENUTUP
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	Rincian LRA
Lampiran	3	Daftar Beban Dibayar Dimuka
Lampiran	4	Daftar Persediaan
Lampiran	5	Daftar Saldo Persediaan
Lampiran	6	Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
Lampiran	7	Daftar Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
Lampiran	9	Daftar Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Daerah
Lampiran	14	Keterkaitan LRA, LO, dan Neraca – Perhitungan Beban Pegawai, Pemeliharaan, Perjalanan Dinas, Hibah, Bantuan Sosial, dan Lain-lain
Lampiran	15	Keterkaitan LRA, LO, dan Neraca – Perhitungan Beban Persediaan
Lampiran	16	Keterkaitan LRA, LO, dan Neraca – Perhitungan Beban Penyisihan dan Beban Penyusutan
Lampiran	17	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Neraca dan LRA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Neraca; (c) Laporan Operasional (LO); (d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (e) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Bandung, 23 Mei 2025

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil



Yuke Mauliani Septina, ST., M.Si.
Pembina Utama Muda

NIP. 197409261998032005

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2024**

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	TAHUN ANGGARAN 2023 (AUDITED)	TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
1	2	3	4	5	10=(5-4)	11= (5/4)x100%
I	KEGIATAN OPERASIONAL					
I.1	PENDAPATAN	5.4.2.1				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.4.2.1.1				
	Pendapatan Pajak Daerah	5.4.2.1.1.1	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00
	Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.2.1.1.2	Rp33.610.000,00	Rp6.400.000,00	(Rp27.210.000,00)	-80,96
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan	5.4.2.1.1.3	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00
	Lain-lain PAD Yang sah	5.4.2.1.1.4	Rp465.544.533,00	Rp4.000,00	(Rp465.540.533,00)	-100,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		Rp499.154.533,00	Rp6.404.000,00	(Rp492.750.533,00)	-98,72
I.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.4.2.1.2				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	5.4.2.1.2.1				
	Dana Bagi Hasil Pajak	5.4.2.1.2.1.1	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.4.2.1.2.1.2	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00
	Dana Alokasi Umum	5.4.2.1.2.1.3	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00
	Dana Alokasi Khusus	5.4.2.1.2.1.4	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00
	Dana Penyesuaian	5.4.2.1.2.2	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00
I.3	TRANSFER ANTAR DAERAH	5.4.2.1.2.2				
	Bantuan Keuangan	5.4.2.1.2.2.1	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00
I.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.4.2.1.3				
	Pendapatan hibah	5.4.2.1.3.1	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00
	Pendapatan Lainnya	5.4.2.1.3.2	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN		Rp499.154.533,00	Rp6.404.000,00	(Rp492.750.533,00)	-98,72
II	BEBAN					
II.1	BEBAN OPERASI	5.4.2.2				
	Beban Pegawai	5.4.2.2.1	Rp21.881.000.593,00	Rp22.466.700.772,00	Rp585.700.179,00	2,68
	Beban Persediaan	5.4.2.2.2	Rp37.739.516.054,00	Rp4.891.443.804,00	(Rp32.848.072.250,00)	-87,04
	Beban Jasa	5.4.2.2.3	Rp21.382.572.365,00	Rp25.071.480.401,00	Rp3.688.908.036,00	17,25
	Beban Pemeliharaan	5.4.2.2.4	Rp2.149.917.639,00	Rp2.907.842.971,00	Rp757.925.332,00	35,25
	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.2.5	Rp10.647.748.708,00	Rp14.637.966.285,00	Rp3.990.217.577,00	37,47
	Beban Bunga	5.4.2.2.6	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00
	Beban Subsidi	5.4.2.2.7	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00
	Beban Hibah	5.4.2.2.8	Rp4.075.875.000,00	Rp975.382.744,00	(Rp3.100.492.256,00)	-76,07
	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.2.9	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.2.10	Rp2.605.956.667,00	Rp2.581.709.953,00	(Rp24.246.714,00)	-0,93
	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.2.11	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00
	Beban Transfer	5.4.2.2.12	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00
	Beban Lain-lain	5.4.2.2.13	Rp2.084.270,00	Rp12.897.562,00	Rp10.813.292,00	518,80
	Jumlah Beban Operasi		Rp100.484.671.296,00	Rp73.545.424.492,00	(Rp26.939.246.804,00)	-26,81
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	5.4.2.3	(Rp99.985.516.763,00)	(Rp73.539.020.492,00)	Rp26.446.496.271,00	-28,45
II.2	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.2.4				
	SURPLUS NON OPERASIONAL	5.4.2.4.1				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00
	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00
	Jumlah Surplus Non Operasional		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00
II.3	DEFISIT NON OPERASIONAL	5.4.2.4.2				
	Defisit Penjualan Aset Non Lancar		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00
	Jumlah Defisit Non Operasional		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	5.4.2.5	(Rp99.985.516.763,00)	(Rp73.539.020.492,00)	Rp26.446.496.271,00	-28,45
III	POS LUAR BIASA	5.4.2.6				
III.1	PENDAPATAN LUAR BIASA					
	Pendapatan Luar Biasa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Luar Biasa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00
III.2	BEBAN LUAR BIASA					
	Beban Luar Biasa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00
	Jumlah Beban Luar Biasa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00
	POS LUAR BIASA		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00
IV	SURPLUS/DEFISIT LO	5.4.2.7	(Rp99.985.516.763,00)	(Rp73.539.020.492,00)	Rp26.446.496.271,00	-28,45

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Bandung, 23 Mei 2025

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

Yuke Mauliani Septina, ST., M.Si.
NIP. 197409261998032005



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 31 Dec 2024 (Audited)	Lebih / (Kurang)	%	Realisasi 31 Dec 2023 (Audited)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6 = 4 / 3 * 100	7
4	Pendapatan					
4.1	Pendapatan Asli Daerah	Rp337.700.000,00	Rp6.404.000,00	(Rp331.296.000,00)	1,90	Rp30.500.000,00
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp37.700.000,00	Rp6.400.000,00	(Rp31.300.000,00)	16,98	Rp30.500.000,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp300.000.000,00	Rp4.000,00	(Rp299.996.000,00)	0,00	Rp0,00
4.2	Pendapatan Transfer	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
4.2.01.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pajak (DBH)	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
4.2.01.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
4.2.01.02	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
4.3.02	Pendapatan Dana Darurat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
4	Jumlah Pendapatan	Rp337.700.000,00	Rp6.404.000,00	(Rp331.296.000,00)	1,90	Rp30.500.000,00
5	Belanja					
5.1	Belanja Operasi	Rp78.424.019.246,00	Rp70.420.846.528,00	(Rp8.003.172.618,00)	89,79	Rp100.739.616.762,00
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp23.647.436.642,00	Rp22.466.700.772,00	(Rp1.180.735.870,00)	95,01	Rp23.252.462.477,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp52.128.832.604,00	Rp46.975.836.432,00	(Rp5.151.996.172,00)	90,12	Rp73.410.979.285,00
5.1.03	Belanja Bunga	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
5.1.05	Belanja Hibah	Rp2.647.750.000,00	Rp977.309.424,00	(Rp1.670.440.576,00)	36,91	Rp4.076.175.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
5.2	Belanja Modal	Rp3.235.555.958,00	Rp2.330.343.600,00	(Rp905.212.358,00)	72,02	Rp2.728.124.534,00
5.2.01	Belanja Tanah	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	Rp1.880.087.703,00	Rp1.625.524.304,00	(Rp254.563.399,00)	86,46	Rp2.530.022.624,00
5.2.03	Belanja Gedung dan Bangunan	Rp1.159.325.000,00	Rp628.319.296,00	(Rp531.005.704,00)	54,20	Rp198.101.910,00
5.2.04	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp162.212.505,00	Rp44.500.000,00	(Rp117.712.505,00)	27,43	Rp0,00
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp33.930.750,00	Rp32.000.000,00	(Rp1.930.750,00)	94,31	Rp0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
5.4	Belanja Transfer	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
5.4.01	Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Pajak ke Kab/Kota	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
5.4.02	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
5	Jumlah Belanja	Rp81.669.575.204,00	Rp72.751.190.228,00	(Rp8.908.384.976,00)	89,09	Rp103.467.741.296,00
	SURPLUS / (DEFISIT) - LRA	(Rp81.321.875.204,00)	(Rp72.744.786.228,00)	Rp8.577.088.976,00		(Rp103.437.241.296,00)
6	Pembiayaan					
6.1	Penerimaan Pembiayaan					
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan					
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
	Pembiayaan Netto	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	(Rp81.321.875.204,00)	(Rp72.744.786.228,00)	Rp8.577.088.976,00		(Rp103.437.241.296,00)

Bandung, 23 Mei 2025
KAPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

(Signature)
Yuke Mauliani Septina, ST., M.Si.
NIP. 19740620199002005

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
NERACA**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2024

No	Uraian	Ref	2024 (Audited)	2023 (Audited)
1	2	3	4	5
1	ASET			
1.1	ASET LANCAR			
1.1.1	Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
	Kas di BLUD		0,00	0,00
	Kas BOS		0,00	0,00
1.1.3	Piutang Pajak Daerah		0,00	0,00
1.1.4	Piutang Retribusi Daerah		0,00	0,00
1.1.5	Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		15.126.680,00	0,00
1.1.7	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
1.1.8	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		0,00	0,00
1.1.9	Bagian Lancar Piutang Sewa		0,00	0,00
1.1.10	Piutang Lain-lain		0,00	0,00
1.1.11	Penyisihan Piutang		0,00	0,00
1.1.12	Beban Dibayar Dimuka		0,00	0,00
1.1.13	Persediaan		196.842.389,00	129.106.059,00
	Jumlah Aset Lancar		211.969.069,00	129.106.059,00
1.2	ASET TETAP			
1.2.1	Tanah		21.036.180.000,00	21.036.180.000,00
1.2.2	Peralatan dan Mesin		22.221.140.173,00	20.528.660.244,00
1.2.3	Gedung dan Bangunan		31.680.378.048,00	31.664.471.748,00
1.2.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan		920.058.634,00	920.058.634,00
1.2.5	Aset Tetap Lainnya		240.366.216,00	240.366.216,00
1.2.6	Konstruksi dalam Pengerjaan		0,00	0,00
1.2.7	Akumulasi Penyusutan		-39.933.029.799,00	-37.355.408.750,00
	Jumlah Aset Tetap		36.165.093.272,00	37.034.328.092,00
1.3	ASET LAINNYA			
1.3.1	Tagihan Jangka Panjang		0,00	0,00
1.3.2	Tagihan Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
	Tagihan Bagian Jangka Panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		0,00	0,00
1.3.3			0,00	0,00
1.3.4	Tagihan Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa		0,00	0,00
1.3.5	Kemiraaan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
1.3.6	Aset Tidak Berwujud		204.444.660,00	204.444.660,00
1.3.7	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		-8.518.550,00	-4.429.646,00
1.3.8	Aset Lain-lain		4.618.755.331,00	4.618.755.331,00
1.3.9	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		-4.618.755.331,00	-4.618.755.331,00
	Jumlah Aset Lainnya		195.926.110,00	200.015.014,00
	JUMLAH ASET		36.572.988.451,00	37.363.449.165,00
2	KEWAJIBAN			
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0,00	0,00
2.1.2	Pendapatan Diterima Dimuka		0,00	0,00
2.1.3	Utang Belanja		34.136.871,00	30.363.321,00
2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		34.136.871,00	30.363.321,00
	JUMLAH KEWAJIBAN		34.136.871,00	30.363.321,00
3	EKUITAS		36.538.851.580,00	37.333.085.844,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		36.572.988.451,00	37.363.449.165,00

Bandung, 23 Mei 2025
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT


Yuke Mauliani Septina, ST., M.Si.
NIP. 197409261998032005

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2024**

URAIAN	AUDITED 2024	AUDITED 2023
EKUITAS AWAL	37.333.085.844,00	37.029.323.596,00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	-73.554.147.172,00	-99.985.516.763,00
RK PPKD	72.744.786.228,00	100.189.942.520,00
RA PPKD (Nilai Perolehan)	0,00	-274.010.000,00
RA PPKD (Akumulasi Penyusutan)	0,00	274.010.000,00
EKUITAS	0,00	99.336.491,00
EKUITAS AKHIR	36.523.724.900,00	37.333.085.844,00

Bandung, 23 Mei 2025

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**



Yuke Mauliani Septina, ST., M.Si.

NIP. 197409261998032005

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 189 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil ini sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Audited). Laporan Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Tahun 2024 Audited ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran I.

Laporan Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Tahun 2024 Audited ini disusun dari laporan keuangan seluruh satuan kerja yang berada di bawah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran Tahun 2024 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode dari 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan-LRA pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp6.404.000,00 atau sebesar 0,03 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp337.700.000,00 .

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA pada Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah-LRA sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00 persen dari yang dianggarkan, Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp6.400.000,00 atau mencapai 16,98 persen dari yang dianggarkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA sebesar Rp4.000,00 atau mencapai 16,98 persen dari yang dianggarkan.

Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp72.751.190.228,00 atau mencapai 89,09 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp81.659.575.204,00 . Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp70.420.846.628,00 atau 89,79 persen dari yang dianggarkan dan Belanja Modal sebesar Rp2.330.343.600,00 atau 72,02 persen dari yang dianggarkan. Berdasarkan realisasi Pendapatan-LRA sebesar Rp6.404.000,00 dan Belanja sebesar Rp72.751.190.228,00 peroleh Surplus/(Defisit)-LRA sebesar (Rp72.744.786.228,00).

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah) :

Uraian	Tahun Anggaran 2024 (Audited)		Tahun Anggaran 2023 (Audited)	
	Anggaran Perubahan	Realisasi	Anggaran Perubahan	Realisasi
Pendapatan-LRA	337.700.000,00	6.404.000,00	30.500.000,00	541.471.200,00
Pendapatan Asli Daerah-LRA	337.700.000,00	6.404.000,00	30.500.000,00	541.471.200,00
Pendapatan Pajak Daerah-LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	37.700.000,00	6.400.000,00	30.500.000,00	33.610.000,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA	300.000.000,00	4.000,00	0,00	507.861.200,00
Pendapatan Transfer-LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah-LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Dana Darurat-LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja	81.659.575.204,00	72.751.190.228,00	103.467.741.296,00	100.731.413.720,00
Belanja Operasi	78.424.019.246,00	70.420.846.628,00	100.739.616.762,00	98.101.139.984,00
Belanja Pegawai	23.647.436.642,00	22.466.700.772,00	23.252.462.477,00	21.881.769.505,00
Belanja Barang dan Jasa	52.128.832.604,00	46.976.836.432,00	73.410.979.285,00	72.143.495.479,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	2.647.750.000,00	977.309.424,00	4.076.175.000,00	4.075.875.000,00

Uraian	Tahun Anggaran 2024 (Audited)		Tahun Anggaran 2023 (Audited)	
	Anggaran Perubahan	Realisasi	Anggaran Perubahan	Realisasi
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal	3.235.555.958,00	2.330.343.600,00	2.728.124.534,00	2.630.273.736,00
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.880.087.703,00	1.625.524.304,00	2.530.022.624,00	2.433.420.338,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.159.325.000,00	628.319.296,00	198.101.910,00	196.853.398,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	162.212.505,00	44.500.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	33.930.750,00	32.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus/(Defisit)-LRA	-81.321.875.204,00	-72.744.786.228,00	-103.437.241.296,00	-100.189.942.520,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Jumlah Aset per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp36.572.988.451,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp211.969.069,00, Aset Tetap sebesar Rp36.165.093.272,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp195.926.110,00.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp34.136.871,00 yang seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Sementara itu jumlah Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp36.538.851.580,00.

Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 dapat disajikan pada tabel berikut dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Aset Lancar	211.969.069,00	129.106.059,00
Aset Tetap	36.165.093.272,00	37.034.328.092,00
Aset Lainnya	195.926.110,00	200.015.014,00
Jumlah Aset	36.572.988.451,00	37.363.449.165,00
Kewajiban Jangka Pendek	34.136.871,00	30.363.321,00

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Jumlah Kewajiban	34.136.871,00	30.363.321,00
Ekuitas	36.538.851.580,00	37.333.085.844,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	36.572.988.451,00	37.363.449.165,00

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menunjukkan kinerja sesungguhnya dalam Tahun Anggaran 2024. Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.404.000,00 , Beban Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp73.545.424.492,00 , Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran Rp0,00 dan Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2024 sebesar (Rp73.539.020.492,00) .

Ringkasan Laporan Operasional Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Tahun Anggaran 2023 (Audited)
Pendapatan-LO	6.404.000,00	499.154.533,00
Beban	73.545.424.492,00	100.484.671.296,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	-73.539.020.492,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0,00	-99.985.516.763,00
Pos Luar Biasa	0,00	0,00
Surplus/(Defisit)-LO	-73.539.020.492,00	-99.985.516.763,00

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/(defisit)-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp37.333.085.844,00 , Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2024 sebesar (Rp73.539.020.492,00) , RK PPKD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp72.744.786.228,00 , RA PPKD (Perolehan) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 , RA PPKD (Penyusutan) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 , Ekuitas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 , dan Ekuitas Akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp36.538.851.580,00.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Tahun Anggaran 2023 (Audited)
Ekuitas Awal	37.333.085.844,00	37.029.323.596,00
Surplus/(Defisit)-LO	-73.539.020.,00	-99.985.516.763,00
RK PPKD	72.744.786.228,00	100.189.942.520,00
RA PPKD (Perolehan)	0,00	-274.010.000,00
RA PPKD (Penyusutan)	0,00	274.010.000,00
Ekuitas	0,00	99.336.491,00
Ekuitas Akhir	36.538.851.580,00	37.333.085.844,00

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang terdiri dari Pendapatan – LRA, Belanja dan Pembiayaan diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Daerah. Sementara itu, dalam penyajian Laporan Operasional yang terdiri dari Pendapatan – LO dan Beban; Neraca yang terdiri dari Aset, Kewajiban, dan Ekuitas diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Daerah.

Dalam CaLK ini diungkapkan juga kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Perangkat Daerah, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan Perangkat Daerah yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, pengambilan keputusan serta menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dan Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.3 INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS AKUNTANSI

Domisili dan Bentuk Hukum Entitas serta Yurisdiksi Tempat Entitas Berada

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan pada tanggal 22 November 2016 beralamat di Jalan Soekarno Hatta No 705 Bandung Telp (022) 7302775 Fax (022) 7331978 website : www.diskumkm.jabrprov.go.id.

Sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokok

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat tugas pokok Dinas Koperasi dan Usaha Kecil adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil, meliputi ijin usaha simpan pinjam, pengawasan dan pemeriksaan koperasi,

penilaian kesehatan KSP/USP koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha kecil, dan pengembangan usaha kecil yang menjadi kewenangan provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi sebagai berikut: :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di Koperasi dan Usaha Kecil yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. penyelenggaraan teknis di bidang Koperasi dan Usaha Kecil yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil melaksanakan kegiatan operasionalnya di bidang Koperasi dan Usaha Kecil berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, Peraturan Gubernur Jawa barat Nomor 61 Tahun 2016 tentang tugas, fungsi, rincian tugas unit, dan tatakerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika penulisan laporan keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dengan beberapa

modifikasi dan penambahan yang dianggap perlu untuk tujuan kelengkapan dalam pelaporan keuangan, sebagai berikut:

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Informasi Umum tentang Entitas Akuntansi
- 1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Strategis, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Strategis
- 2.3 Kebijakan Keuangan
- 2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target APBD
- 3.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.3 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi
- 4.2 Pendekatan penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- 4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.3.1 Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.3.2 Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.3.3 Catatan Penting Lainnya
- 5.2 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
 - 5.3.4 Penjelasan Umum Neraca
 - 5.3.5 Penjelasan Per Pos Neraca
 - 5.3.6 Catatan Penting Lainnya
- 5.3 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - 5.3.1 Penjelasan Umum Laporan Operasional
 - 5.3.2 Penjelasan Per Pos Laporan Operasional
 - 5.3.3 Catatan Penting Lainnya
- 5.4 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.4.1 Penjelasan Per Pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.4.2 Catatan Penting Lainnya

Bab VI Penjelasan atas Informasi Non-Keuangan Perangkat Daerah

Bab VII Penutup

BAB II**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN STRATEGIS, KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD****2.1 EKONOMI MAKRO**

Indikator makro yang mempengaruhi perumusan strategi dan penyusunan anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil adalah sasaran, indikator sasaran, dan program yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJ Perangkat Daerah) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat serta Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat.

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

Mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, menetapkan, dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dib bidang Koperasi dan Usaha Kecil berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2022

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	25
2	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	2
3	Program pendidikan dan pelatihan perkoperasian	1
4	Program Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	2
5	Program Pemberdayaan UMKM	1
6	Program pelayanan ijin usaha simpan pinjam	2
7	Program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	1
JUMLAH		28

2.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Salah satu instrumen untuk dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan prima adalah perumusan perencanaan strategik. Dengan perumusan perencanaan strategik yang dikomunikasikan kepada seluruh lapisan pegawai, maka diharapkan tantangan perubahan zaman dapat disikapi dengan arif dan bijak.

Perencanaan strategik Dinas Koperasi dan Usaha Kecil merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil .

Visi

Visi Dinas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil adalah “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan inovasi dan kolaborasi nilai religius, bahagia, adil, kloaboratif dan inovatif”.

Misi

1. Membentuk manusia pancasila yang bertaqwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban;
2. Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif melalui pelayanan publik yang inovatif;
3. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah;
4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan;
5. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaborati antara pemerintah pusat, provinsi dan Kab/Kota.

Visi dan Misi diatas diterjemahkan dalam beberapa strategi yang ditempuh oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil diatas, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat melaksanakan upaya sebagai-berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya;
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha ekonomi umat;
3. Meningkatkan proses penyusunan APBD yang aspiratif, transparan dan akuntabel yang berorientasi kepada anggaran kinerja;
4. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD;
5. Pengaturan pengelolaan keuangan dan aset yang efisien, efektif dan akuntabel;
6. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan pelayanan prima;
7. Meningkatkan sarana dan prasarana;
8. Meningkatkan pembinaan, koordinasi dan perencanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
9. Meningkatkan koordinasi dengan Stakeholder di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan organisasi terkait;

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, pengambilan keputusan serta menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

2.3 KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2024 didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sedangkan kebijakan pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil diselenggarakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022;
3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dan Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 160 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat ;

2.5 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Perjanjian Kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Gubernur Provinsi Jawa Barat) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dibawah ini adalah Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Strategis Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Tahun 2019 - 2024 :

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran IKU	Target
1.	Mewujudkan pertumbuhan koperasi berkualitas	Pertumbuhan koperasi berkualitas	Koperasi naik kelas
2.	Meningkatkan pertumbuhan akses modal KUK	Pertumbuhan akses modal KUK	UMKM juara
3.	Meningkatnya jumlah rasio wirausaha	Pertumbuhan jumlah wirausaha	Scale up dan Start up

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari Perencanaan Kinerja Tahunan sangat penting dilakukan oleh Pimpinan Instansi di lingkungan pemerintahan, karena merupakan wahana proses dalam memberikan perspektif mengenai hal yang diinginkan untuk dihasilkan Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan Perencanaan Kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil akan lebih baik. Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Tahun 2019 - 2024, dan mengacu pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

BAB III**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
PERANGKAT DAERAH****3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET APBD****Pendapatan-LRA**

Realisasi Pendapatan-LRA pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp6.404.000,00 atau 1,90 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp337.700.000,00 . Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LRA sebesar Rp6.404.000,00 Pendapatan Transfer sebesar Rp0,00 dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp0,00 .

- a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA sebesar Rp6.404.000,00 atau 1,90 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp337.700.000,00 , terdiri dari:
 1. Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp6.400.000,00 atau 16,98 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp37.700.000,00 .
 2. Lain-lain PAD yang Sah-LRA sebesar Rp4.000,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00 .

Ringkasan Laporan Realisasi Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah):

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	%	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)
1	2	3	4	$5 = 4/3 \times 100\%$	6
1	Pendapatan Asli Daerah-LRA	337.700.000,00	6.404.000,00	1,90	541.471.200,00
	- Pendapatan Pajak Daerah-LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	37.700.000,00	6.400.000,00	16,98	33.610.000,00
	- Lain-lain PAD yang Sah -LRA	300.000.000,00	4.000,00	0,00	507.861.200,00

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	%	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)
	Jumlah	337.700.000,00	6.404.000,00	1,90	541.471.200,00

Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2023, berarti realisasi Pendapatan-LRA Tahun anggaran 2024 menurun sebesar (Rp24.096.000,00) atau - 79,00 persen dibanding Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp30.500.000,00 .

Belanja

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp72.751.190.228,00 atau 89,09 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp81.659.575.204,00 .

Rincian Belanja Tahun Anggaran 2024 berdasarkan jenis belanjanya adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi sebesar Rp70.420.846.628,00 atau 89,79 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp78.424.019.246,00 , terdiri dari:
 1. Belanja Pegawai sebesar Rp22.466.700.772,00 atau 95,01 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp23.647.436.642,00 ;
 2. Belanja Barang dan jasa sebesar Rp46.976.836.432,00 atau 90,12 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp52.128.832.604,00 ;
 3. Belanja Hibah sebesar Rp977.309.424,00 atau 36,91 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp2.647.750.000,00 ;
 4. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 .
- b. Belanja Modal sebesar Rp2.330.343.600,00 atau 72,02 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp3.235.555.958,00 , terdiri dari:
 1. Belanja Tanah sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 .
 2. Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.880.087.703,00 atau 86,46 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp1.880.087.703,00 .
 3. Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp628.319.296,00 atau 54,20 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp1.159.325.000,00 .

4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp44.500.000,00 atau 27,43 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp162.212.505,00 .
5. Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp32.000.000,00 atau 94,31 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp33.930.750,00 .
6. Belanja Aset Lainnya sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 .

Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah):

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	%	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100%	6
1	Belanja Operasi	78.424.019.246,00	70.420.846.628,00	89,79	98.101.139.984,00
	- Belanja Pegawai	23.647.436.642,00	22.466.700.772,00	95,01	21.881.769.505,00
	- Belanja Barang & jasa	52.128.832.604,00	46.976.836.432,00	90,12	72.143.495.479,00
	- Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Hibah	2.647.750.000,00	977.309.424,00	36,91	4.075.875.000,00
	- Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal	3.235.555.958,00	2.330.343.600,00	72,02	2.630.273.736,00
	- Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Peralatan dan Mesin	1.880.087.703,00	1.625.524.304,00	86,46	2.433.420.338,00
	- Belanja Gedung dan Bangunan	1.159.325.000,00	628.319.296,00	54,20	196.853.398,00
	- Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	162.212.505,00	44.500.000,00	27,43	0,00
	- Belanja Aset Tetap Lainnya	33.930.750,00	32.000.000,00	94,31	0,00

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	%	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)
	- Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	81.659.575.204,00	72.751.190.228,00	89,09	100.731.413.720,00

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp103.467.741.296,00 , berarti realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 menurun sebesar (Rp30.716.551.068,00)atau -29,69 persen dibanding Tahun Anggaran 2023.

Realisasi penyerapan belanja pada tahun 2024 belum optimal disebabkan beberapa hal diantaranya yaitu:

1. Adanya reconfusing anggaran

Surplus/(Defisit)-LRA

Surplus/(Defisit)-LRA Tahun Anggaran 2024 dihasilkan dari pengurangan antara Realisasi Pendapatan-LRA dan Realisasi Belanja, yaitu Surplus/(Defisit)-LRA sebesar (Rp72.744.786.228,00).

3.2 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Pendapatan-LO

Realisasi Pendapatan-LO pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp6.404.000,00 yang semuanya merupakan realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO, terdiri dari:

- a. Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp6.400.000,00 .
- b. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO sebesar Rp4.000,00 .

Beban

Beban pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp73.545.424.492,00 . Rincian berdasarkan jenis beban adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Tahun Anggaran 2023 (Audited)
Beban Pegawai	22.466.700.772,00	21.881.000.593,00
Beban Persediaan	4.891.443.804,00	37.739.516.054,00
Beban Jasa	25.071.480.401,00	21.382.572.365,00
Beban Pemeliharaan	2.907.842.971,00	2.149.917.639,00
Beban Perjalanan Dinas	14.637.966.285,00	10.647.748.708,00
Beban Bunga	0,00	0,00
Beban Subsidi	0,00	0,00
Beban Hibah	975.382.744,00	4.075.875.000,00
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.581.709.953,00	2.605.956.667,00
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Transfer	0,00	0,00
Beban Lain-lain	12.897.562,00	2.084.270,00
Jumlah	73.545.424.492,00	100.484.671.296,00

3.3 HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITENTUKAN

Persentase Realisasi Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2024 sebesar 1,90 persen.

Persentase Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar 1,90 persen. Pencapaian anggaran tersebut belum tercapai, hal ini disebabkan karena adanya refofusing anggaran.

BAB IV**KEBIJAKAN AKUNTANSI****4.1 ENTITAS AKUNTANSI**

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil beserta jenjang struktural dibawahnya merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Untuk Tahun Anggaran 2024, entitas akuntansi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil mencakup:

No	Bidang/Bagian/Satker	Jumlah Subbid/Subbag/Subsatker
1	Kepala Dinas	1 orang
2	Sekretariat	3 Subbag
3	Bidang Kelembagaan Koperasi	3 Subbid
4	Bidang Pemberdayaan Koperasi	3 Subbid
5	Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	3 Subbid
6	Bidang Usaha Kecil	3 Subbid
7	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Kewirausahaan	1 Subbag/2 Seksi
Jumlah Subbid/Subbag/Subsatker		12 Subbid/ 4 Subbag/ 2 Seksi

Sedangkan penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang meliputi pencatatan barang milik daerah (aset tetap dan persediaan) dalam rangka menghasilkan akun laporan neraca dilakukan oleh Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu, yang mencakup:

No	Pengelola BMD	Jumlah
1	Kasubbag Umum/Pegawai	1 Orang
2	Pengurus Barang	1 Orang
3	Pengurus Barang Pembantu	2 Orang
Total		4 Orang

4.2 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Dinas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil disusun berdasarkan proses akuntansi yang menghasilkan data/laporan keuangan dari seluruh satuan kerja beserta jenjang struktural dibawahnya yang ada pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil.

Laporan Keuangan yang disajikan dihasilkan melalui proses akuntansi keuangan dan proses pencatatan barang milik daerah.

Proses akuntansi dan pencatatan tersebut dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran seluruh unit kerja yang berada dibawah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil. Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari Pendapatan-LRA dan Belanja

2. Neraca

Neraca disusun berdasarkan perhitungan akuntansi yang menghasilkan saldo akun-akun neraca dari seluruh unit kerja yang berada dibawah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional disusun berdasarkan perhitungan akuntansi yang menghasilkan saldo akun-akun Laporan Operasional dari seluruh unit kerja yang berada di bawah Dinas

Koperasi dan Usaha Kecil. Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Surplus dan Defisit-LO.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas disusun berdasarkan perhitungan akuntansi yang menghasilkan saldo akun-akun Laporan Perubahan Ekuitas seluruh unit kerja yang berada di bawah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta dalam rangka pengungkapan yang memadai.

4.3 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil disusun menggunakan basis akrual untuk pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas pada Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, yaitu diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian yang berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan dari Kas Umum Daerah.

Sedangkan untuk pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan menggunakan basis kas pada Laporan Realisasi Anggaran, yaitu diakui pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Daerah atau di Bendahara Penerimaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil atau saat kas dibayar dari Kas Umum Daerah.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

4.4 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan-LRA diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau SK PERANGKAT DAERAH atau entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD. Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas dicatat berdasarkan azas bruto tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pendapatan-LRA dinilai sebesar nilai tercatat. Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas Pendapatan-LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Belanja dinilai sebesar nilai tercatat. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas Belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

(3) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO dicatat sebesar nilai yang tertera pada dokumen pendukung pendapatan berdasarkan azas bruto. Pendapatan-LO dinilai sebesar nilai tercatat. Pendapatan-LO disajikan pada Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi sumber pendapatan.

Dengan basis akrual, Pendapatan-LO diakui jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan;
- 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi berupa penerimaan kas di Bendahara Penerimaan atau di Rekening Kas Umum Daerah maupun sumber daya ekonomi non kas yang diterima oleh entitas.

(4) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan. Beban disajikan pada Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi ekonomi.

(5) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak memenuhi kriteria tersebut, dikategorikan sebagai aset non lancar.

1. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika (1) diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan, atau (2) berupa kas dan setara kas.

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan, dan beban dibayar di muka.

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal neraca.

Investasi Jangka Pendek dicatat sebesar nilai perolehan, yaitu jumlah uang yang ditempatkan atau dikeluarkan untuk memperoleh investasi tersebut. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri, ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Apabila investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga (saham dan obligasi jangka pendek) diperoleh tanpa biaya perolehan maka investasi itu dinilai berdasarkan nilai wajar yaitu harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham (deposito jangka pendek) diukur sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Pengukuran **Piutang** dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi yang menjadi hak Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Piutang dinilai sebesar jumlah yang dapat direalisasikan, setelah memperhitungkan penyisihan piutang tidak tertagih, dan penghapusan piutang. Piutang pada tanggal Neraca disajikan secara wajar sesuai dengan nilai piutang yang dapat ditagih (net realizable value). Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak.

Untuk menghasilkan nilai piutang secara wajar maka dilakukan ***Penyisihan Piutang Tak Tertagih***. Pada akhir periode anggaran dilakukan analisis atas kemungkinan nilai piutang yang dapat ditagih maupun yang tidak dapat ditagih. Kebijakan Akuntansi Penyisihan Piutang didasarkan pada umur piutang, dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan, karena jenis piutang sangat bervariasi dan kemungkinan tidak tertagih juga sangat bervariasi, tergantung pada karakteristik piutang yang bersangkutan.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Penyisihan piutang yang tidak dapat ditagih dilakukan setiap akhir periode pelaporan. Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih menggunakan pendekatan neraca (balance sheet), yaitu dengan cara perhitungan daftar umur piutang (aging schedule). Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada saat:

- Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; atau
- Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah

Pengukuran Persediaan adalah sebagai berikut:

- a. Harga perolehan jika Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;

- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*);
- d. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Persediaan dinilai dengan metoda Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) atau *First In First Out* (FIFO).

Persediaan biologis adalah persediaan yang mengalami pertumbuhan, seperti hewan dan tumbuhan. Pada saat perolehan pertama kali, aset biologis diukur dengan:

- a. Harga perolehan, atau
- b. Nilai wajar jika harga perolehan tidak tersedia.

Pada saat terjadi transformasi biologis, maka aset biologis akan diukur sebesar nilai wajar. Contohnya sapi yang melahirkan anak maka anak sapi tersebut diukur sebesar nilai wajar.

Persediaan biologis diukur setiap akhir periode akuntansi berdasarkan nilai wajar. Selisih nilai wajar akibat transformasi biologis akan diakui sebagai:

- a. Pendapatan non operasional, jika terjadi penambahan nilai wajar; dan
- b. Beban non operasional, jika terjadi pengurangan nilai wajar.

Nilai Wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Beban Dibayar Dimuka merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang merupakan klaim pihak tertentu yang pelunasannya dalam bentuk selain kas. Beban Dibayar Dimuka timbul akibat pembelian (belanja) barang/Jasa atau aktiva lain yang belum diterima atau belum sepenuhnya diterima oleh Pemda.

2. Aset Non Lancar

Aset Non Lancar meliputi semua aset selain yang termasuk pada dua kriteria aset lancar. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tidak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset Non Lancar meliputi Investasi jangka panjang, Aset tetap, Dana Cadangan dan Aset lainnya.

1. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi non permanen dan investasi permanen.

(i) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi Non Permanen meliputi:

- (1) pinjaman kepada perusahaan negara;
- (2) pinjaman kepada perusahaan daerah;
- (3) pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya;
- (4) investasi dalam surat utang negara;
- (5) investasi dalam proyek pembangunan;
- (6) investasi nonpermanen lainnya.

(ii) Investasi Permanen

Investasi Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen terdiri dari penyertaan modal di perusahaan daerah dan di perusahaan negara.

Investasi Permanen dinilai menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penilaian investasi permanen dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu:

- Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan Metode biaya; Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

2. Aset Tetap

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset Tetap dilaporkan pada neraca Dinas Koperasi dan Usaha Kecil per 31 Desember 2024 berdasarkan harga perolehan dan/atau berdasarkan penilaian kembali oleh Tim Penertiban Aset BMD.

Aset Tetap dinilai sebesar biaya perolehan. Apabila biaya perolehan aset tetap tidak tersedia, maka nilai aset tetap dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Belanja Modal yang nilainya dibawah batas minimal kapitalisasi aset tetap, tidak disajikan sebagai aset tetap di Neraca, namun dicatat tersendiri sebagai *Extracomptable*.

Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Suatu pengeluaran dikapitalisasi menjadi aset tetap, jika memenuhi kriteria :

- a. Dibayarkan melalui mekanisme belanja modal;
- b. Jumlah pengeluaran minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) unit barang;
- c. Jumlah pengeluaran minimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk per grup;

d. Aset yang diperoleh memenuhi kriteria aset tetap.

Aset tetap, kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, disusutkan untuk menunjukkan penurunan nilai dan manfaatnya. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus.

3. Dana Cadangan

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Pembentukan Dana Cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D LS terkait pembentukan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.

4. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak berwujud, dan Aset Lain-lain.

Tagihan Jangka Panjang terdiri atas Tagihan Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran, Tagihan Bagian Jangka Panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, dan Tagihan Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa.

(i) *Tagihan Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran* menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

(ii) *Tagihan Bagian Jangka Panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah*

menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum

baik sengaja maupun lalai. Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

(iii) Tagihan Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa

menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari sewa aset pemerintah daerah kepada pihak ketiga yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca. Tagihan Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran, Tagihan Bagian Jangka Panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, dan Tagihan Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Aset Lainnya.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga dapat berupa Pihak Ketiga-Sewa yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) yang dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji, Bangun Guna Serah (BGS)/ *Build Operate Transfer* (BOT) yang dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut, atau Bangun Serah Guna (BGS)/ *Build Transfer Operate* (BTO) yang dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

Aset kerjasama/kemitraan selain tanah dilakukan penyusutan dengan metode garis lurus. Masa manfaat dan nilai residu dipersamakan dengan masa manfaat dan nilai residu jenis aset yang sama di Aset Tetap

Aset Tidak Berwujud adalah aset nonkeuangan, termasuk hak atas kekayaan intelektual, yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki oleh Pemerintah Provinsi untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya.

Aset Tidak Berwujud diakui pada saat manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tidak Berwujud, suatu aset harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Aset nonkeuangan;
- b. Tidak berwujud;

- c. Biaya perolehan dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. Dapat diidentifikasi;
- g. Dapat dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- h. Mempunyai potensi manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan lebih dari dua belas bulan

Terhadap aset tidak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi kedalam *Aset Lain-lain*. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Di samping itu, piutang macet Perangkat Daerah yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

(6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional; perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah; kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya dan Kewajiban dengan pemberi jasa lainnya; kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek yaitu kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, dan Utang Belanja.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai *Kewajiban Jangka Panjang* jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas diakui pada saat terjadi kenaikan atau penurunan hak pemerintah atas kekayaan pemerintah, yang diakibatkan oleh adanya surplus/(defisit)-LO, SiLPA/SiKPA, serta penutupan saldo Perubahan SAL. Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

4.5 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP ENTITAS AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas pos-pos Laporan Keuanganseluruhnya sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerint

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan-LRA pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.404.000,00 atau 1,90 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp337.700.000,00 .

Realisasi Pendapatan - LRA pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.404.000,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp30.500.000,00 . Hal ini berarti realisasi Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2024 menurun sebesar (Rp24.096.000,00)dibanding Tahun Anggaran 2023.

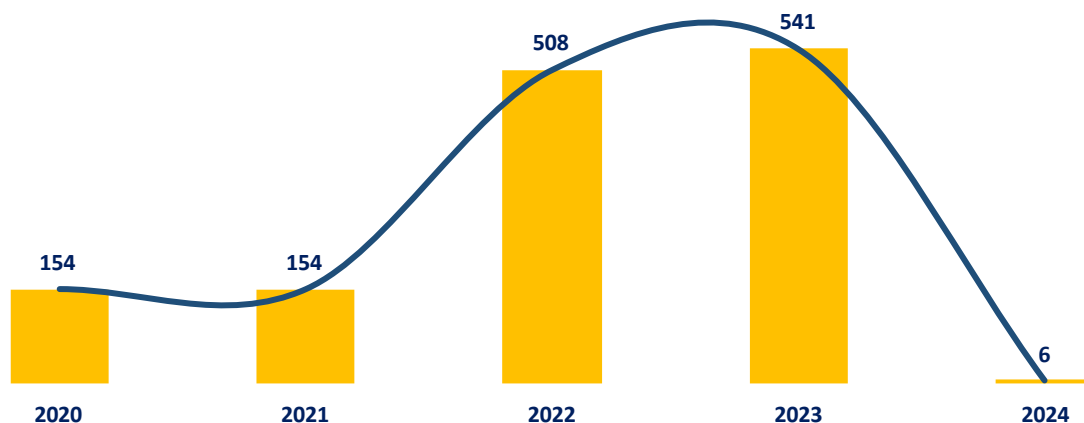
Realisasi Pendapatan-LRA pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.404.000,00 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LRA sebesar Rp6.404.000,00 ,Pendapatan Transfer-LRA sebesar Rp0,00 , Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LRA sebesar Rp0,00 . Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.404.000,00 atau 1,90 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp337.700.000,00 , terdiri dari:

- a. Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp6.400.000,00 atau 16,98 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp37.700.000,00 ;
- b. Lain-lain PAD yang Sah-LRA sebesar Rp4.000,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00 .

Trend realisasi Pendapatan selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik Trend Realisasi Pendapatan
Tahun Anggaran 2019 s.d 2024

Dalam Jutaan Rupiah



Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp72.751.190.228,00 atau 89,09 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp81.659.575.204,00 . Realisasi Belanja ini berasal dari Belanja Operasi sebesar Rp70.420.846.628,00 Belanja Modal sebesar Rp2.330.343.600,00 .

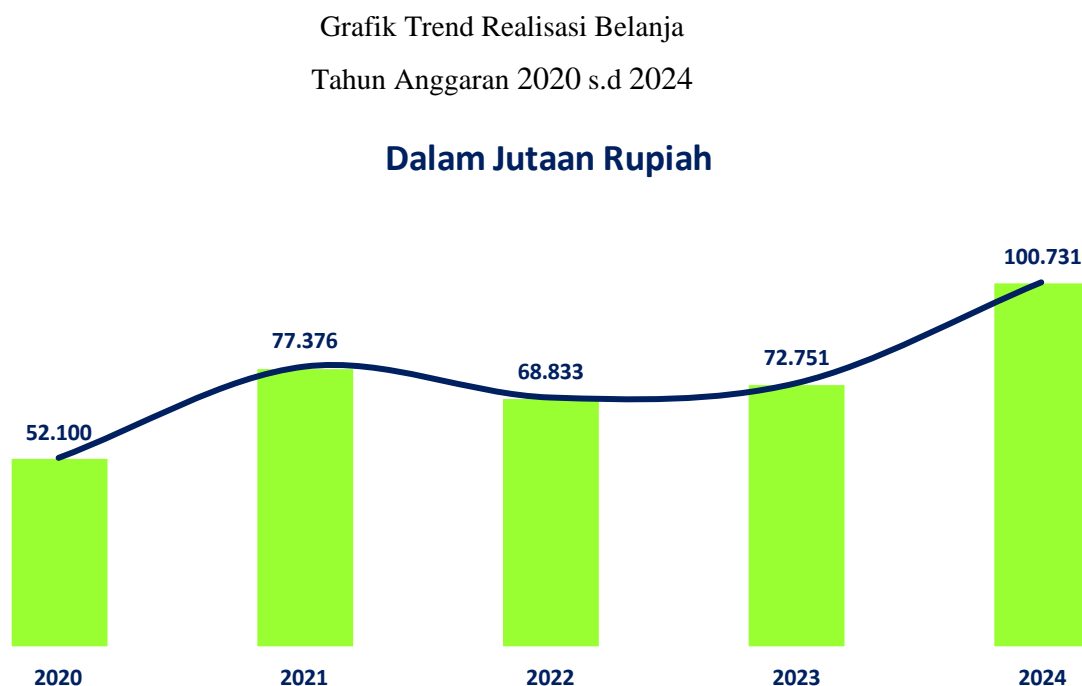
Belanja Operasi sebesar Rp70.420.846.628,00 atau 89,79 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp78.424.019.246,00 , terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai sebesar Rp22.466.700.772,00 atau 95,01 dari yang dianggarkan sebesar Rp23.647.436.642,00 ;
- 2) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp46.976.836.432,00 atau 90,12 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp52.128.832.604,00 ;
- 2) Belanja Bunga sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 ;
- 3) Belanja Subsidi sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 ;
- 4) Belanja Hibah sebesar Rp977.309.424,00 atau 36,91 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp2.647.750.000,00 ;
- 5) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 .

Belanja Modal sebesar Rp2.330.343.600,00 atau 72,02 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp3.235.555.958,00 , terdiri dari:

- 1) Belanja Modal Tanah sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 ;
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.625.524.304,00 atau 86,46 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp1.880.087.703,00 ;
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp628.319.296,00 atau 54,20 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp1.159.325.000,00 ;
- 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp44.500.000,00 atau 27,43 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp162.212.505,00 ;
- 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp32.000.000,00 atau 94,31 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp33.930.750,00 ;
- 6) Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 ;

Trend realisasi Belanja selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

tidak mengalami perubahan dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan realisasi Pendapatan-LRA sebesar Rp6.404.000,00 dan realisasi Belanja sebesar Rp72.751.190.228,00 maka terjadi Surplus/(Defisit)-LRA sebesar (Rp72.744.786.228,00).

5.1.2 PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.2.1 Pendapatan-LRA

Realisasi Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp6.404.000,00 atau 1,90 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp337.700.000,00 .

Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp30.500.000,00 , berarti realisasi Pendapatan-LRA menurun dibanding Tahun Anggaran 2023 sebesar -79,00 persen atau sebesar (Rp24.096.000,00).

Realisasi pendapatan pada tahun 2024 tercapai sebesar 1,90 persen, disebabkan beberapa hal diantaranya yang paling signifikan yaitu:

1. Berubahnya kebijakan tentang sewa gedung senbik
2. Menurunnya pendapatan sewa ruang

5.1.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA

Realisasi Pendapatan Asli Daerah(PAD)-LRA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.404.000,00 atau 1,90 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp337.700.000,00 . Apabila dibandingkan dengan realisasi PAD-LRA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp30.500.000,00 , berarti realisasi PAD-LRA menurun sebesar (Rp24.096.000,00)atau -0,79 persen dibanding Tahun Anggaran 2023.

Realisasi PAD-LRA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.404.000,00 terdiri dari:

- a. Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp6.400.000,00 atau 16,98 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp37.700.000,00 ;
- b. Lain-lain PAD yang Sah-LRA sebesar Rp4.000,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00 .

5.1.2.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.400.000,00 atau 16,98 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp37.700.000,00 .

Rincian realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LRA adalah sebagai berikut (dalam Rp):

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2024	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	%
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100
1	Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00	0,00
2	Retribusi Jasa Usaha	37.700.000,00	6.400.000,00	16,98
3	Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00
Jumlah		37.700.000,00	6.400.000,00	16,98

Pencapaian realisasi Pendapatan Retribusi - LRA tercapai 16,98 persen dari pagu disebabkan beberapa hal, diantaranya yang paling signifikan yaitu: Berubahnya kebijakan tentang sewa gedung senbik.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp30.500.000,00 berarti Pendapatan Retribusi Daerah-LRA menurun sebesar (Rp24.100.000,00)atau -79,02 persen dibanding Tahun Anggaran 2023.

Realisasi Pendapatan Daerah-LRA Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023, dapat dilihat pada rincian pada tabel di bawah ini (dalam Rp):

No	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	YoY %
1	2	3	4	5= ((3-4)/4) x100%
1	Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00	0,00
2	Retribusi Jasa Usaha	6.400.000,00	33.610.000,00	-80,96
3	Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00
Jumlah		6.400.000,00	33.610.000,00	-80,96

Pertumbuhan realisasi Pendapatan Retribusi - LRA menurun sebesar (Rp24.100.000,00)atau -79,02 persen dibanding Tahun Anggaran 2023 , hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya yang paling signifikan yaitu:

1. Menurunnya pendapatan sewa ruang

5.1.2.1.1.2 Lain-lain PAD yang Sah-LRA

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LRA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.000,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00 .

Rincian realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LRA adalah sebagai berikut (dalam Rp):

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2024	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	%
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan – LRA	0,00	0,00	0,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LRA	300.000.000,00	0,00	0,00
3	Hasil Kerja Sama Daerah – LRA	0,00	0,00	0,00
4	Jasa Giro - LRA	0,00	0,00	0,00
5	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LRA	0,00	0,00	0,00
6	Pendapatan Bunga – LRA	0,00	0,00	0,00
7	Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LRA	0,00	0,00	0,00
8	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LRA	0,00	0,00	0,00
9	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	0,00	0,00	0,00
10	Pendapatan Denda Pajak Daerah – LRA	0,00	0,00	0,00
11	Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LRA	0,00	4.000,00	0,00
12	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan – LRA	0,00	0,00	0,00
13	Pendapatan Dari Pengembalian – LRA	0,00	0,00	0,00
14	Pendapatan BLUD – LRA	0,00	0,00	0,00
15	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan – LRA	0,00	0,00	0,00
16	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir- LRA	0,00	0,00	0,00
17	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) – LRA	0,00	0,00	0,00
18	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan - LRA	0,00	0,00	0,00
Jumlah		300.000.000,00	0,00	0,00

Pencapaian realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LRA tersebut tercapai 0,00 persen dari pagu disebabkan beberapa hal diantaranya yang paling signifikan yaitu:

1. Berubahnya kebijakan tentang sewa gedung senbik

Apabila dibandingkan dengan realisasi Lain - lain PAD yang Sah-LRA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp300.000.000,00 , berarti realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LRA menurun dibanding Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp300.000.000,00) atau -100,00 persen.

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LRA Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023, dapat dilihat pada rincian pada tabel di bawah ini (dalam Rp):

No	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	%
1	2	3	4	5= ((3-4)/4) x100%
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan – LRA	0,00	0,00	0,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LRA	0,00	507.800.000,00	-100,00
3	Hasil Kerja Sama Daerah – LRA	0,00	0,00	0,00
4	Jasa Giro - LRA	0,00	0,00	0,00
5	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LRA	0,00	0,00	0,00
6	Pendapatan Bunga – LRA	0,00	0,00	0,00
7	Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LRA	0,00	0,00	0,00
8	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LRA	0,00	0,00	0,00
9	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	0,00	0,00	0,00
10	Pendapatan Denda Pajak Daerah – LRA	0,00	0,00	0,00
11	Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LRA	4.000,00	61.200,00	-93,46
12	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan – LRA	0,00	0,00	0,00
13	Pendapatan Dari Pengembalian – LRA	0,00	0,00	0,00
14	Pendapatan BLUD – LRA	0,00	0,00	0,00
15	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan – LRA	0,00	0,00	0,00
16	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir- LRA	0,00	0,00	0,00
17	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) – LRA	0,00	0,00	0,00
18	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan - LRA	0,00	0,00	0,00
Jumlah		4.000,00	61.200,00	0,00

Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LRA meningkat sebesar Rp4.000,00 atau 0,00 persen dibanding Tahun Anggaran 2023, hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya yang paling signifikan yaitu:

1. Pendapatan diperoleh dari denda retribusi

5.1.2.2 Belanja

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp72.751.190.228,00 atau 89,09 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp81.659.575.204,00 .

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 89,09 persen pagu disebabkan beberapa hal diantaranya yang paling signifikan yaitu:

1. Adanya reconfusing anggaran
2. Adanya efisiensi belanja belanja barang/jasa

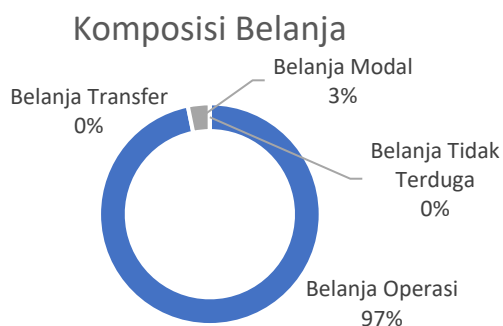
Realisasi Belanja sebesar Rp72.751.190.228,00 berasal dari Belanja Operasi sebesar Rp70.420.846.628,00 , Belanja Modal sebesar Rp2.330.343.600,00 . Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp103.467.741.296,00 , berarti realisasi Belanja menurun sebesar (Rp30.716.551.068,00)atau -29,69 persen dibanding Tahun Anggaran 2023.

Realisasi penyerapan Belanja pada Tahun Anggaran 2024 menurun dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023, disebabkan beberapa hal diantaranya yaitu:

1. Adanya reconfusing anggaran
2. Adanya efisiensi belanja belanja barang/jasa

Berikut ini disajikan grafik komposisi realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024.

Grafik Komposisi Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2024



Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi terbesar dari Belanja berasal dari Belanja operasi yaitu sebesar Rp70.420.846.628,00 atau 89,79 persen dari Total Belanja.

5.1.2.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp70.420.846.628,00 atau 89,79 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp78.424.019.246,00 . Realisasi Belanja Operasi ini berasal dari Belanja Pegawai sebesar Rp22.466.700.772,00 , Belanja Barang dan jasa

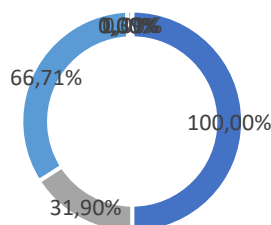
sebesar Rp46.976.836.432,00 , Belanja Bunga sebesar Rp0,00 , Belanja Subsidi sebesar Rp0,00 , Belanja Hibah sebesar Rp977.309.424,00 , dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp0,00 .

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 , berarti realisasi Belanja Operasi tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dibanding Tahun Anggaran 2023.

Berikut ini disajikan grafik komposisi realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024.

Grafik Komposisi Realisasi Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2024

Komposisi Belanja Operasi



Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi terbesar dari Belanja Operasi berasal dari Belanja Pegawai yaitu sebesar 0,00 persen dari Total Belanja Operasi.

5.1.2.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp22.466.700.772,00 atau 95,01 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp23.647.436.642,00 .

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, disebabkan antara lain :

1. Adanya perubahan mata anggaran

Rincian realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2024	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	%
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100%
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.874.266.465,00	6.545.743.544,00	95,22
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	4.878.950.140,00	4.659.538.800,00	95,50
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	499.107.461,00	489.181.410,00	98,01
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	166.603.500,00	159.290.000,00	95,61
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	335.102.000,00	318.416.000,00	95,02
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	147.374.500,00	138.390.000,00	93,90
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	260.093.672,00	256.728.900,00	98,71
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	19.451.724,00	13.939.172,00	71,66
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	135.100,00	59.579,00	44,10
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	482.741.216,00	472.421.132,00	97,86
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	13.293.190,00	9.444.637,00	71,05
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	39.879.872,00	28.333.914,00	71,05
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	31.534.090,00	0,00	0,00
5.1.01.01.13	Belanja Jaminan Hari Tua ASN	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	15.953.223.678,00	15.125.881.647,00	94,81
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	15.829.168.008,00	15.044.769.647,00	95,04
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	124.055.670,00	81.112.000,00	65,38
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	819.946.499,00	795.075.581,00	96,97
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	761.626.499,00	751.893.553,00	98,72
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	58.320.000,00	43.182.028,00	74,04
5.1.01.03.09	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.10	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.11	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2024	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	%
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100%
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	23.647.436.642,00	22.466.700.772,00	95,01

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp23.252.462.477,00 , berarti realisasi Belanja Pegawai menurun sebesar (Rp785.761.705,00) atau -3,38 persen dibanding Tahun Anggaran 2023.

Realisasi belanja pegawai pada tahun 2024 meningkat sebesar -3,38 persen disebabkan beberapa hal diantaranya yaitu:

1. Adanya perubahan mata anggaran

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023, dapat dilihat pada rincian pada tabel di bawah ini (dalam rupiah):

Kode Rekening	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	YoY %
1	2	3	4	5= ((3-4)/4) x100%
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.545.743.544,00	6.278.550.671,00	4,26
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	4.659.538.800,00	4.472.880.100,00	4,17
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	489.181.410,00	451.347.028,00	8,38
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	159.290.000,00	218.840.000,00	-27,21
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	318.416.000,00	193.814.000,00	64,29
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	138.390.000,00	148.110.000,00	-6,56
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	256.728.900,00	261.363.780,00	-1,77
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.939.172,00	11.307.786,00	23,27
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	59.579,00	61.100,00	-2,49
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	472.421.132,00	484.294.256,00	-2,45
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.444.637,00	9.133.153,00	3,41
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	28.333.914,00	27.399.468,00	3,41
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.13	Belanja Jaminan Hari Tua ASN	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	15.125.881.647,00	14.896.454.917,00	1,54
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	15.044.769.647,00	14.775.254.917,00	1,82
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	81.112.000,00	121.200.000,00	-33,08

Kode Rekening	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	YoY %
1	2	3	4	5= ((3-4)/4) x100%
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	795.075.581,00	706.763.917,00	12,50
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	751.893.553,00	706.763.917,00	6,39
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	43.182.028,00	0,00	0,00
5.1.01.03.09	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.10	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.11	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	YoY %
1	2	3	4	5= ((3-4)/4) x100%
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	22.466.700.772,00	21.881.769.505,00	2,67

5.1.1.1.1.1 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp46.976.836.432,00 atau 90,12 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp52.128.832.604,00 .

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, disebabkan antara lain :

1. Adanya efisiensi belanja barang dan jasa
2. Terbatasnya waktu pelaksanaan realisasi anggaran

Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2024	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	%
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100%
5.1.02.01	Belanja Barang	5.754.589.186,00	4.960.909.946,00	86,21
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.754.589.186,00	4.960.909.946,00	86,21
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.03	Belanja Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	26.912.868.656,00	24.707.901.851,00	91,81
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	21.192.740.208,00	19.693.578.887,00	92,93
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	419.740.448,00	316.983.050,00	75,52
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.335.820.000,00	3.769.981.970,00	86,95
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	153.840.000,00	149.600.000,00	97,24
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	253.000.000,00	251.620.000,00	99,45
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	221.728.000,00	191.012.944,00	86,15
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	336.000.000,00	335.125.000,00	99,74
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	2.912.288.525,00	2.297.053.350,00	78,87
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.031.857.250,00	653.113.186,00	63,29
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.812.571.275,00	1.576.200.164,00	86,96
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	67.860.000,00	67.740.000,00	99,82
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	16.185.889.737,00	14.651.166.285,00	90,52
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.754.239.737,00	14.509.444.445,00	92,10
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	431.650.000,00	141.721.840,00	32,83
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	363.196.500,00	359.805.000,00	99,07
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2024	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	%
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100%
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	363.196.500,00	359.805.000,00	99,07
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	0,00	0,00	0,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	0,00	0,00	0,00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	0,00	0,00	0,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00	0,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00	0,00
Jumlah		52.128.832.604,00	46.976.836.432,00	90,12

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan jasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp73.410.979.285,00 , berarti realisasi Belanja Barang dan jasa menurun sebesar (Rp26.434.142.853,00)atau -36,01 persen dibanding Tahun Anggaran 2023.

Realisasi belanja barang dan jasa Tahun 2024 menurun disebabkan beberapa hal diantaranya yaitu:

1. Adanya efisiensi belanja barang dan jasa
2. Terbatasnya waktu pelaksanaan realisasi anggaran

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023, dapat dilihat pada rincian pada tabel di bawah ini (dalam rupiah):

Kode Rekening	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	YoY %
1	2	3	4	5 = ((3-4)/4) x100%
5.1.02.01	Belanja Barang	4.960.909.946,00	4.212.678.625,00	17,76
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.960.909.946,00	4.212.678.625,00	17,76
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.03	Belanja Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	24.707.901.851,00	21.560.150.507,00	14,60
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	19.693.578.887,00	18.461.345.204,00	6,67
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	316.983.050,00	138.378.656,00	129,07
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.769.981.970,00	1.917.219.314,00	96,64
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	149.600.000,00	236.000.000,00	-36,61
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	YoY %
1	2	3	4	5= ((3-4)/4) x100%
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	251.620.000,00	48.000.000,00	424,21
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	191.012.944,00	159.638.583,00	19,65
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	335.125.000,00	599.568.750,00	-44,11
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	2.297.053.350,00	2.149.917.639,00	6,84
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	193.736.038,00	-100,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	653.113.186,00	1.006.904.824,00	-35,14
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.576.200.164,00	802.277.027,00	96,47
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	67.740.000,00	146.999.750,00	-53,92
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	14.651.166.285,00	10.647.748.708,00	37,60
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.509.444.445,00	10.474.130.308,00	38,53
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	141.721.840,00	173.618.400,00	-18,37
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	359.805.000,00	33.573.000.000,00	-98,93
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	33.573.000.000,00	-100,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	359.805.000,00	0,00	0,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	0,00	0,00	0,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	0,00	0,00	0,00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	0,00	0,00	0,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00	0,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	46.976.836.432,00	72.143.495.479,00	-34,88

5.1.1.1.1.2 Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Anggaran 2024 sebesar Rp977.309.424,00 atau 36,91 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp2.647.750.000,00 .

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, disebabkan antara lain :

1. Adanya perubahan target penerima hibah
2. Perberkasan yang tidak lengkap

Rincian realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2024	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	%
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100%
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.647.750.000,00	977.309.424,00	36,91
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.150.000.000,00	0,00	0,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	522.750.000,00	510.398.936,00	97,64
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	150.000.000,00	0,00	0,00
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	825.000.000,00	466.910.488,00	56,60
5.1.05.05.05	Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	0,00	0,00	0,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00
Jumlah		2.647.750.000,00	977.309.424,00	36,91

:

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum sebesar Rp977.309.424,00 diantaranya kepada koperasi

Rincian Belanja Hibah Barang/Jasa kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia adalah sebagai berikut:

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.076.175.000,00 , berarti realisasi Belanja Hibah menurun sebesar (Rp3.098.865.576,00) atau -76,02 persen dibanding Tahun Anggaran 2023.

Realisasi belanja hibah Tahun 2023 menurun disebabkan beberapa hal diantaranya yaitu:

1. Adanya perubahan target penerima hibah

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023, dapat dilihat pada rincian pada tabel di bawah ini (dalam rupiah):

Kode Rekening	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	%
1	2	3	4	$5 = \frac{(3-4)}{4} \times 100\%$
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	977.309.424,00	4.075.875.000,00	-76,02
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	4.027.220.000,00	-100,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	510.398.936,00	0,00	0,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	466.910.488,00	48.655.000,00	859,64
5.1.05.05.05	Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	0,00	0,00	0,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00
Jumlah		977.309.424,00	4.075.875.000,00	-76,02

Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.330.343.600,00 atau 72,02 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp3.235.555.958,00 .

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, disebabkan antara lain :

1. Efisiensi belanja

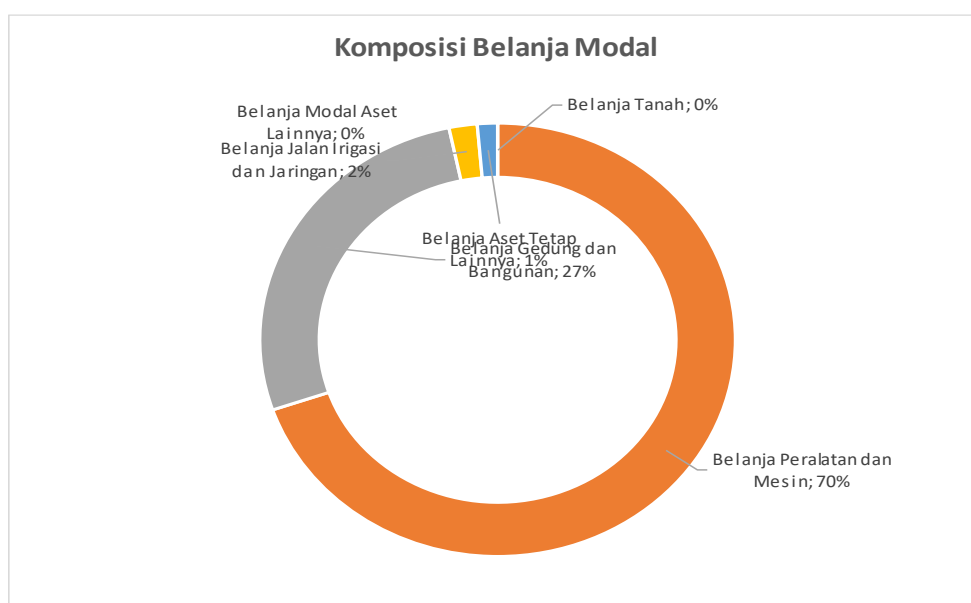
Realisasi Belanja Modal ini berasal dari Belanja Tanah sebesar Rp0,00 , Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.625.524.304,00 , Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp628.319.296,00 , Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp44.500.000,00 , Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp32.000.000,00 , dan Belanja Aset Lainnya sebesar Rp0,00 .

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.728.124.534,00 , berarti realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 menurun sebesar (Rp397.780.934,00) atau -14,58 persen.

Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 menurun disebabkan beberapa hal diantaranya yaitu: Efisiensi belanja

Berikut ini disajikan grafik komposisi realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024.

Grafik Komposisi Realisasi Belanja Modal
Tahun Anggaran 2024



Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi terbesar dari Belanja Modal berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin yaitu sebesar 86 persen dari Total Belanja Modal.

5.1.2.2.1 Belanja Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 .

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, disebabkan antara lain :

1. Tidak dianggarkan belanja modal tanah

Rincian realisasi Belanja Tanah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2024	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	%
1	2	3	4	$5 = \frac{4}{3} \times 100\%$
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	0,00	0,00	0,00
5.2.01.01.02	Belanja Modal Tanah Non Persil	0,00	0,00	0,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	0,00	0,00	0,00
5.2.01.99.99	Belanja Modal Tanah BLUD	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Tanah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 , berarti realisasi Modal Tanah tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dibanding Tahun Anggaran 2023.

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2024 tidak mengalami perubahan disebabkan beberapa hal diantaranya yaitu: Tidak dianggarkan belanja modal tanah

Realisasi Belanja Tanah Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023, dapat dilihat pada rincian pada tabel di bawah ini (dalam rupiah):

No	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	%
1	2	3	4	$5 = \frac{(3-4)}{4} \times 100\%$
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	0,00	0,00	0,00
5.2.01.01.02	Belanja Modal Tanah Non Persil	0,00	0,00	0,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	0,00	0,00	0,00
5.2.01.99.99	Belanja Modal Tanah BLUD	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00

5.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.625.524.304,00 atau 86,46 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp1.880.087.703,00 .

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, disebabkan antara lain :

1. Efisiensi belanja barang modal

Rincian realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2024	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	%
1	2	3	4	$5 = 4/3 \times 100\%$
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	24.350.000,00	24.000.000,00	98,56
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00
5.2.02.01.02	Belanja Modal Alat Besar Apung	0,00	0,00	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	24.350.000,00	24.000.000,00	98,56
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02.04	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02.05	Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	0,00	0,00	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	887.608.930,00	779.866.250,00	87,86
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	149.316.790,00	101.493.000,00	67,97
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	738.292.140,00	678.373.250,00	91,88
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	256.705.800,00	180.309.354,00	70,24
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	155.005.800,00	132.759.354,00	85,65
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	101.700.000,00	47.550.000,00	46,76
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	0,00	0,00	0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	0,00	0,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2024	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	%
1	2	3	4	$5 = 4/3 \times 100\%$
5.2.02.08.02	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.05	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.06	Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.09	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	502.472.973,00	432.848.700,00	86,14
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	329.999.023,00	277.633.700,00	84,13
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	172.473.950,00	155.215.000,00	89,99
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	208.950.000,00	208.500.000,00	99,78
5.2.02.11.01	Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi	0,00	0,00	0,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	208.950.000,00	208.500.000,00	99,78
5.2.02.12	Belanja Modal Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00
5.2.02.12.01	Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin	0,00	0,00	0,00
5.2.02.12.02	Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin	0,00	0,00	0,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	0,00	0,00	0,00
5.2.02.13.02	Belanja Modal Produksi	0,00	0,00	0,00
5.2.02.13.03	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00
5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00
5.2.02.14.01	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00
5.2.02.14.02	Belanja Modal Alat Bantu Produksi	0,00	0,00	0,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00
5.2.02.15.01	Belanja Modal Alat Deteksi	0,00	0,00	0,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	0,00	0,00	0,00
5.2.02.15.04	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan	0,00	0,00	0,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	0,00	0,00	0,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00	0,00	0,00
5.2.02.17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00
5.2.02.17.01	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu - Rambu	0,00	0,00	0,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu - Rambu Lalu Lintas Darat	0,00	0,00	0,00
5.2.02.18.02	Belanja Modal Rambu - Rambu Lalu Lintas Udara	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2024	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	%
1	2	3	4	$5 = \frac{4}{3} \times 100\%$
5.2.02.18.03	Belanja Modal Rambu - Rambu Lalu Lintas Laut	0,00	0,00	0,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	0,00	0,00	0,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	0,00	0,00	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	0,00	0,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	0,00	0,00
Jumlah		1.880.087.703,00	1.625.524.304,00	86,46

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.530.022.624,00, berarti realisasi Belanja Peralatan dan Mesin menurun sebesar (Rp904.498.320,00) atau -35,75 persen dibanding Tahun Anggaran 2023. Hal ini disebabkan oleh :

1. Efisiensi belanja barang modal

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023, dapat dilihat pada rincian pada tabel di bawah ini (dalam rupiah):

No	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	YoY %
1	2	3	4	$5 = \frac{(3-4)}{4} \times 100\%$
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	24.000.000,00	682.100.000,00	-96,48
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00
5.2.02.01.02	Belanja Modal Alat Besar Apung	0,00	0,00	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	24.000.000,00	682.100.000,00	-96,48
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02.04	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02.05	Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	YoY %
1	2	3	4	5= ((3-4)/4) x100%
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	0,00	0,00	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	779.866.250,00	127.089.309,00	513,64
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	101.493.000,00	104.289.309,00	-2,68
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	678.373.250,00	22.800.000,00	2.875,32
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	180.309.354,00	414.536.932,00	-56,50
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	132.759.354,00	404.736.932,00	-67,20
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	47.550.000,00	9.800.000,00	385,20
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	0,00	0,00	0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	0,00	0,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.02	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.05	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.06	Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.09	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	432.848.700,00	1.209.694.097,00	-64,22
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	277.633.700,00	925.725.000,00	-70,01
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	155.215.000,00	283.969.097,00	-45,34
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	208.500.000,00	0,00	0,00
5.2.02.11.01	Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi	0,00	0,00	0,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	208.500.000,00	0,00	0,00
5.2.02.12	Belanja Modal Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00
5.2.02.12.01	Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	YoY %
1	2	3	4	5= ((3-4)/4) x100%
5.2.02.12.02	Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin	0,00	0,00	0,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	0,00	0,00	0,00
5.2.02.13.02	Belanja Modal Produksi	0,00	0,00	0,00
5.2.02.13.03	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00
5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00
5.2.02.14.01	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00
5.2.02.14.02	Belanja Modal Alat Bantu Produksi	0,00	0,00	0,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00
5.2.02.15.01	Belanja Modal Alat Deteksi	0,00	0,00	0,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	0,00	0,00	0,00
5.2.02.15.04	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan	0,00	0,00	0,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	0,00	0,00	0,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00	0,00	0,00
5.2.02.17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00
5.2.02.17.01	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu - Rambu	0,00	0,00	0,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu - Rambu Lalu Lintas Darat	0,00	0,00	0,00
5.2.02.18.02	Belanja Modal Rambu - Rambu Lalu Lintas Udara	0,00	0,00	0,00
5.2.02.18.03	Belanja Modal Rambu - Rambu Lalu Lintas Laut	0,00	0,00	0,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	0,00	0,00	0,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	0,00	0,00	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	0,00	0,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.625.524.304,00	2.433.420.338,00	-33,20

5.1.2.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp628.319.296,00 atau 54,20 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp1.159.325.000,00 .

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, disebabkan antara lain :

1. Efisiensi belanja modal

Rincian realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2024	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	%
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100%
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.159.325.000,00	628.319.296,00	54,20
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.159.325.000,00	628.319.296,00	54,20
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	0,00	0,00	0,00
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	0,00	0,00	0,00
5.2.03.03	Belanja Modal Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00
5.2.03.03.01	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	0,00	0,00	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	0,00	0,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	0,00	0,00
Jumlah		1.159.325.000,00	628.319.296,00	54,20

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp198.101.910,00 , berarti realisasi Belanja Gedung dan Bangunan meningkat sebesar Rp430.217.386,00 atau 217,17 persen dibanding Tahun Anggaran 2023.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 meningkat disebabkan beberapa hal diantaranya yaitu: *Efisiensi belanja modal*

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023, dapat dilihat pada rincian pada tabel di bawah ini (dalam rupiah):

No	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	YoY %
1	2	3	4	5= ((3-4)/4) x100%
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	628.319.296,00	196.853.398,00	219,18
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	628.319.296,00	196.853.398,00	219,18
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	0,00	0,00	0,00
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	YoY %
1	2	3	4	5 = ((3-4)/4) x 100%
5.2.03.03	Belanja Modal Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00
5.2.03.03.01	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	0,00	0,00	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	0,00	0,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	0,00	0,00
Jumlah		628.319.296,00	196.853.398,00	219,18

5.1.2.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp44.500.000,00 atau 27,43 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp162.212.505,00 .

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, disebabkan antara lain :

1. Efisiensi belanja

Rincian realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2024	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	%
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100%
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	0,00	0,00	0,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02.03	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	0,00	0,00	0,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	117.212.505,00	0,00	0,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	117.212.505,00	0,00	0,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00
5.2.04.03.04	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	0,00	0,00	0,00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2024	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	%
1	2	3	4	$5 = 4/3 \times 100\%$
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	0,00	0,00	0,00
5.2.04.03.07	Belanja Modal Instalasi Pertahanan	0,00	0,00	0,00
5.2.04.03.08	Belanja Modal Instalasi Gas	0,00	0,00	0,00
5.2.04.03.09	Belanja Modal Instalasi Pengaman	0,00	0,00	0,00
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	45.000.000,00	44.500.000,00	98,89
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	45.000.000,00	44.500.000,00	98,89
5.2.04.04.03	Belanja Modal Jaringan Telepon	0,00	0,00	0,00
5.2.04.04.04	Belanja Modal Jaringan Gas	0,00	0,00	0,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0,00	0,00	0,00
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0,00	0,00	0,00
Jumlah		162.212.505,00	44.500.000,00	27,43

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 , berarti realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan meningkat sebesar Rp44.500.000,00 atau 0,00 dibanding Tahun Anggaran 2023.

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2024 meningkat disebabkan beberapa hal diantaranya yaitu: *Efisiensi belanja*

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023, dapat dilihat pada rincian pada tabel di bawah ini (dalam rupiah):

No	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	%
1	2	3	4	$5 = ((3-4)/4) \times 100\%$
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	0,00	0,00	0,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02.03	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	%
1	2	3	4	5= ((3-4)/4) x100%
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	0,00	0,00	0,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	0,00	0,00	0,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00
5.2.04.03.04	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	0,00	0,00	0,00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	0,00
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	0,00	0,00	0,00
5.2.04.03.07	Belanja Modal Instalasi Pertahanan	0,00	0,00	0,00
5.2.04.03.08	Belanja Modal Instalasi Gas	0,00	0,00	0,00
5.2.04.03.09	Belanja Modal Instalasi Pengaman	0,00	0,00	0,00
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	44.500.000,00	0,00	0,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	44.500.000,00	0,00	0,00
5.2.04.04.03	Belanja Modal Jaringan Telepon	0,00	0,00	0,00
5.2.04.04.04	Belanja Modal Jaringan Gas	0,00	0,00	0,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0,00	0,00	0,00
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	44.500.000,00	0,00	0,00

5.1.2.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp32.000.000,00 atau 94,31 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp33.930.750,00 .

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, disebabkan antara lain :

1. Adanya efisiensi belanja

Rincian realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2024	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	%
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100%
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	33.930.750,00	32.000.000,00	94,31
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2024	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	%
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100%
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	33.930.750,00	32.000.000,00	94,31
5.2.05.01.03	Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01.04	Belanja Modal Musik	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01.05	Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material)	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01.06	Belanja Modal Three Dimensional Artifacts and Realita	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01.07	Belanja Modal Tarscalt	0,00	0,00	0,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0,00	0,00	0,00
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00
5.2.05.02.03	Belanja Modal Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00
5.2.05.03	Belanja Modal Hewan	0,00	0,00	0,00
5.2.05.03.01	Belanja Modal Hewan Piaraan	0,00	0,00	0,00
5.2.05.03.02	Belanja Modal Ternak	0,00	0,00	0,00
5.2.05.03.03	Belanja Modal Hewan Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00
5.2.05.06	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00	0,00
5.2.05.06.01	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00	0,00
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00
5.2.05.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
Jumlah		33.930.750,00	32.000.000,00	94,31

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 , berarti realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya meningkat sebesar Rp32.000.000,00 atau 0,00 persen dibanding Tahun Anggaran 2023.

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 meningkat disebabkan beberapa hal diantaranya yaitu: Adanya efisiensi belanja

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada rincian pada tabel di bawah ini (dalam rupiah):

No	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	YoY %
1	2	3	4	5= ((3-4)/4) x100%
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	32.000.000,00	0,00	0,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	32.000.000,00	0,00	0,00
5.2.05.01.03	Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01.04	Belanja Modal Musik	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01.05	Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material)	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01.06	Belanja Modal Three Dimensional Artifacts and Realita	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01.07	Belanja Modal Tarscalt	0,00	0,00	0,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0,00	0,00	0,00
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00
5.2.05.02.03	Belanja Modal Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00
5.2.05.03	Belanja Modal Hewan	0,00	0,00	0,00
5.2.05.03.01	Belanja Modal Hewan Piaraan	0,00	0,00	0,00
5.2.05.03.02	Belanja Modal Ternak	0,00	0,00	0,00
5.2.05.03.03	Belanja Modal Hewan Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.2.05.04	Belanja Modal Biota Perairan	0,00	0,00	0,00
5.2.05.04.01	Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	0,00	0,00	0,00
5.2.05.04.02	Belanja Modal Crustea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)	0,00	0,00	0,00
5.2.05.04.03	Belanja Modal Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)	0,00	0,00	0,00
5.2.05.04.04	Belanja Modal Coelenterata (Ubur-ubur dan Sebangsanya)	0,00	0,00	0,00
5.2.05.04.05	Belanja Modal Echinodermata (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)	0,00	0,00	0,00
5.2.05.04.06	Belanja Modal Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)	0,00	0,00	0,00
5.2.05.04.07	Belanja Modal Reptilia (Buaya, Penyu, Kura - kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)	0,00	0,00	0,00
5.2.05.04.08	Belanja Modal Mammalia (Paus, Lumba - lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)	0,00	0,00	0,00
5.2.05.04.09	Belanja Modal Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di Dalam Air)	0,00	0,00	0,00
5.2.05.04.10	Belanja Modal Biota Perairan Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00
5.2.05.06	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00	0,00
5.2.05.06.01	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00	0,00
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00
5.2.05.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	YoY %
1	2	3	4	5= ((3-4)/4) x100%
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	0,00	0,00	0,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	0,00	0,00	0,00
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00
Jumlah		32.000.000,00	0,00	0,00

5.1.2.2.2.5 Belanja Aset Lainnya

Realisasi Belanja Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 .

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, disebabkan antara lain :

1. Tidak ada pagu anggaran

Rincian realisasi Belanja Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2024	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	%
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100%
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Aset Lainnya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 , berarti realisasi Belanja Aset Lainnya tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dibanding Tahun Anggaran 2023.

Realisasi Belanja Aset Lainnya Tahun 2023 tidak mengalami perubahan disebabkan beberapa hal diantaranya yaitu:

5.1.2.2.2.5 Surplus/(Defisi) – LRA

Berdasarkan realisasi Pendapatan – LRA dan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Surplus/(Defisit) - LRA Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar (Rp72.744.786.228,00), dengan perhitungan sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)
Pendapatan – LRA	6.404.000,00	541.471.200,00
Belanja - LRA	72.751.190.228,00	100.731.413.720,00
Surplus/ (Defisit) – LRA	-72.744.786.228,00	-100.189.942.520,00

5.1.2.5 Perhitungan Anggaran

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar (Rp72.744.786.228,00). Perhitungan Anggaran diperoleh dari selisih antara anggaran dengan realisasinya. Jumlah keseluruhan selisih merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Rincian realisasi Perhitungan Anggaran adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)
Kekurangan Pendapatan/Pelampauan – LRA	(331.296.000,00)	510.971.200,00
Penghematan Belanja	(8.908.384.976,00)	-2.736.327.576,00
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00
Penghematan Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	-72.744.786.228,00	-100.189.942.520,00

5.1.2.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar (Rp72.744.786.228,00). Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran diperoleh dari selisih realisasi Pendapatan – LRA, Belanja, dan Pembiayaan Netto tahun berkenaan. Jumlah keseluruhan selisih realisasi merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Berdasarkan Surplus / Defisit–LRA sebesar (Rp72.744.786.228,00), Realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp0,00 , maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar (Rp72.744.786.228,00) , dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)
Pendapatan – LRA	6.404.000,00	541.471.200,00
Belanja - LRA	72.751.190.228,00	100.731.413.720,00
Surplus / (Defisit) – LRA	-72.744.786.228,00	-100.189.942.520,00
Pembiayaan Netto	0,00	0,00
SILPA	-72.744.786.228,00	-100.189.942.520,00

Dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar (Rp72.744.786.228,00) .

CATATAN PENTING LAINNYA

-

5.2 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

5.2.1 PENJELASAN UMUM NERACA

Ringkasan Komposisi Neraca per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Aset Lancar	211.969.069,00	129.106.059,00
Aset Tetap	36.165.093.272,00	37.034.328.092,00
Aset Lainnya	195.926.110,00	200.015.014,00
Jumlah Aset	36.572.988.451,00	37.363.449.165,00
Kewajiban Jangka Pendek	34.136.871,00	30.363.321,00
Jumlah Kewajiban	34.136.871,00	30.363.321,00
Ekuitas	36.538.851.580,00	37.333.085.844,00
Jumlah Ekuitas	36.538.851.580,00	37.333.085.844,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	36.572.988.451,00	37.363.449.165,00

Jumlah Aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp36.572.988.451,00 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp211.969.069,00 , Aset Tetap sebesar Rp36.165.093.272,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp195.926.110,00 .

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp34.136.871,00 seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp36.538.851.580,00 .

5.2.2 PENJELASAN PER POS NERACA

5.2.2.1 Aset Lancar

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp211.969.069,00 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp129.106.059,00 . Hal ini berarti aset lancar naik sebesar Rp82.863.010,00 atau 64,18 persen.

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Jenis Aset Lancar	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00

Jenis Aset Lancar	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15.126.680,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
Bagian Lancar Piutang Sewa	0,00	0,00
Piutang Lain-lain	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	196.842.389,00	129.106.059,00
Jumlah Aset Lancar	211.969.069,00	129.106.059,00

5.2.2.1.1 Kas di Bendahara Penerimaan

Tidak terdapat Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

5.2.2.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP)/ uang kegiatan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Daerah atau Jasa Giro yang belum disetorkan kembali ke Kas Daerah atau Pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara/Daerah atau Kewajiban yang belum dibayarkan per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 , sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 .

Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Kas Uang Tunai	0	0
Kas di Bank	0	0
Lain-lain	0	0
Jumlah	0	0

5.2.2.1.3 Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp15.126.680,00 , sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 .

Rincian Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Piutang lain-lain PAD	15.126.680,00	0

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
-		
Jumlah	15.126.680,00	0

5.2.2.1.4 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka merupakan pembayaran yang sudah dilakukan namun manfaatnya belum dinikmati atau masih ada manfaatnya.

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00, sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Hal ini berarti Beban Dibayar Dimuka tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen.

Rincian Beban Dibayar Dimuka terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Jumlah		

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Beban Dibayar Dimuka adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

No.	Uraian	Saldo Akhir 2023	Saldo Awal 2024	Mutasi		Saldo Akhir 2024
				Tambah	Kurang	
1						
2						
3						
4						
5						
JUMLAH						

5.2.2.1.5 Persediaan

Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp196.842.389,00 , sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp129.106.059,00 . Hal ini berarti persediaan naik sebesar Rp67.736.330,00 atau 52,47 persen.

Rincian Persediaan terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Barang/perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah		
Bahan/perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi		
Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat		
Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah		
Jumlah	196.842.389,00	129.106.059,00

Rincian Persediaan berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

JENIS PERSEDIAAN	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Barang Pakai Habis	196.842.389,00	129.106.059,00
Bahan Bangunan Dan Konstruksi	0,00	0,00
Bahan Kimia	0,00	0,00
Bahan Bakar Dan Pelumas	0,00	0,00
Bahan Baku	0,00	0,00
Bahan Kimia Nuklir	0,00	0,00
Barang Dalam Proses	0,00	0,00
Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00
Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00
Isi Tabung Gas	0,00	0,00
Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	0,00
Bahan Lainnya	0,00	0,00
Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00
Suku Cadang Alat Besar	0,00	0,00
Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	0,00
Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	0,00
Suku Cadang Alat Pemancar	0,00	0,00
Suku Cadang Alat Studio Dan Komunikasi	0,00	0,00
Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	0,00
Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	0,00
Persediaan Dari Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
Suku Cadang Lainnya	0,00	0,00
Alat Tulis Kantor	25.458.114,00	18.368.439,00
Kertas Dan Cover	0,00	1.675.000,00
Bahan Cetak	15.842.060,00	31.721.160,00

JENIS PERSEDIAAN	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Benda Pos	0,00	0,00
Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00
Bahan Komputer	92.043.400,00	24.387.600,00
Perabot Kantor	18.486.939,00	12.227.350,00
Alat Listrik	19.174.376,00	29.239.010,00
Perlengkapan Dinas	0,00	0,00
Kaporlap Dan Perlengkapan Satwa	0,00	0,00
Perlengkapan Pendukung Olah Raga	3.087.500,00	3.087.500,00
Suvenir/Cendera Mata	22.750.000,00	8.400.000,00
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00
Obat	0,00	0,00
Obat-Obatan Lainnya	0,00	0,00
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	0,00	0,00
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0,00	0,00
Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	0,00	0,00
Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya	0,00	0,00
Natura	0,00	0,00
Pakan	0,00	0,00
Natura Dan Pakan Lainnya	0,00	0,00
Persediaan Penelitian Biologi	0,00	0,00
Persediaan Penelitian Biologi Lainnya	0,00	0,00
Persediaan Penelitian Teknologi	0,00	0,00
Persediaan Penelitian Lainnya	0,00	0,00
Persediaan Dalam Proses	0,00	0,00
Persediaan Dalam Proses Lainnya	0,00	0,00
Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00
Komponen Jembatan Baja	0,00	0,00
Komponen Jembatan Pratekan	0,00	0,00
Komponen Peralatan	0,00	0,00
Komponen Rambu-Rambu	0,00	0,00
Attachment	0,00	0,00
Komponen Lainnya	0,00	0,00
Pipa Air Besi Tuang (Dci)	0,00	0,00
Pipa Asbes Semen (Acp)	0,00	0,00
Pipa Baja	0,00	0,00
Pipa Beton Pratekan	0,00	0,00
Pipa Fiber Glass	0,00	0,00
Pipa Plastik Pvc (Upvc)	0,00	0,00
P I P A Lainnya	0,00	0,00
Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00
Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya	0,00	0,00
Komponen Bekas	0,00	0,00
Pipa Bekas	0,00	0,00
Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya	0,00	0,00

JENIS PERSEDIAAN	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
JUMLAH PERSEDIAAN	196.842.389,00	129.106.059,00

Rekap persediaan menurut jenisnya yaitu sebagai berikut:

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
1.	Barang Pakai Habis		
	- Bahan		
	- Suku Cadang		
	- Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	196.842.389,00	129.106.059,00
	- Obat-Obatan		
	- Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan		
	- Persediaan Untuk Tujuan Strategis/ Berjaga-Jaga		
	- Natura Dan Pakan		
	- Persediaan Penelitian		
	- Persediaan Dalam Proses		
2.	Barang Tak Habis Pakai		
	- Komponen		
	- PIPA		
3.	Barang Bekas Dipakai		
	- Komponen Bekas dan Pipa Bekas		
	Jumlah	196.842.389,00	129.106.059,00

5.2.2.2 Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp36.165.093.272,00 , sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp37.034.328.092,00 . Hal ini berarti Aset Tetap turun sebesar - Rp869.234.820,00 atau -2,35 persen. Rincian Aset Tetap terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Tanah	21.036.180.000,00	21.036.180.000,00
Peralatan dan Mesin	22.221.140.173,00	20.528.660.244,00
Gedung dan Bangunan	31.680.378.048,00	31.664.471.748,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	920.058.634,00	920.058.634,00
Aset Tetap Lainnya	240.366.216,00	240.366.216,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	-39.933.029.799,00	-37.355.408.750,00
Jumlah	36.165.093.272,00	37.034.328.092,00

5.2.2.2.1 Tanah

Nilai Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp21.036.180.000,00 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp21.036.180.000,00 . Hal ini berarti jumlah asset tetap Tanah tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen.

5.2.2.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp22.221.140.173,00 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Hal ini berarti jumlah asset tetap Peralatan dan Mesin naik sebesar Rp1.692.479.929,00 atau 8,24 persen.

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

No	Jenis	Saldo Akhir 2023	Saldo Awal 2024	Mutasi		Saldo Akhir 2024
				Tambah	Kurang	
1	Alat Besar	1.363.813.590,00	1.363.813.590,00	25.623.379,00		1.379.436.968,00
1.1	Alat Besar Darat					
1.2	Alat Bantu					
2	Alat Angkutan	4.375.333.558,00	4.375.333.558,00			4.375.333.558,00
2.1	Alat Angkutan Darat Bermotor					
2.2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor					
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	28.345.337,00	28.345.337,00			28.345.337,00
3.1	Alat Bengkel Bermesin					
3.2	Alat Bengkel Tak Bermesin					
3.3	Alat Ukur					
4	Alat Pertanian					
4.1	Alat Pengolahan					
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.181.149.720,00	9.181.149.720,00	906.252.900,00		10.094.402.620,00
5.1	Alat Kantor.					
5.2	Alat Rumah Tangga					
5.3	Meubelair					
6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	1.274.868.846,00	1.274.868.846,00	401.254.945,00		1.675.923.800,00
6.1	Alat Studio.					
6.2	Alat Komunikasi					
6.3	Peralatan Pemancar					
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	18.350.000,00	18.350.000,00			18.350.000,00
7.1	Alat Kedokteran.					
7.2	Alat Kesehatan Umum					
8	Alat Per-senjataan					
8.1	Persenjataan Non Senjata Api					
9	Komputer	3.917.725.433,00	3.917.725.433,00	362.348.700,00		4.280.074.133,00
9.2	Komputer Unit					
9.2	Peralatan Komputer					
10	Rambu - Rambu	6.000.000,00	6.000.000,00			6.000.000,00
10.1	Rambu – Rambu Lalu Lintas Darat					
11	Peralatan Olah Raga	52.630.000,00	52.630.000,00			52.630.000,00
11.1	Peralatan Olah Raga.					
Jumlah		20.528.660.244,00	20.528.660.244,00	1.692.479.929,00		22.221.140.173,00

Mutasi/perubahan Peralatan dan Mesin tersebut adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Saldo Awal	20.528.660.244,00
Penambahan:	
Realisasi Belanja Modal Yang Menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin (*)	1.625.524.304,00
Penerimaan dari OPD lain (Mutasi masuk antar OPD)	
Pengembangan (Kapitalisasi)	
Koreksi Pencatatan	
Reklasifikasi dari Persediaan, Jenis Aset Tetap Yang Lain, Akun Lainnya (Reklasifikasi Masuk)	
Reklasifikasi dari Jenis Persediaan (Reklasifikasi Masuk)	
Hibah/Pengakuan Penerimaan Lainnya Yang Sah	
Aset Tetap dari BTT	
Jumlah Penambahan	
Pengurangan:	
Penghapusan	
Penyerahan Aset Tetap ke OPD Lain (Mutasi Keluar Antar OPD)	
Koreksi Pencatatan	
Reklasifikasi ke Persediaan, Jenis Aset Tetap Yang Lain, Akun Lainnya (Reklasifikasi Keluar)	
Reklasifikasi ke Persediaan (Reklasifikasi Keluar)	
Hibah/Pengakuan Pengeluaran Lainnya Yang Sah	
Hibah/Mutasi Keluar Aset Tetap dari BTT	
Jumlah Pengurangan	
Jumlah Per 31 Des 2024	22.221.140.173,00

(*) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.625.524.304,00 berasal dari:

- 1) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada LRA Tahun 2024 Anggaran adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Kodering	Uraian	31 Desember 2024
5.2.02	BM Peralatan dan Mesin	1.625.524.304,00
Jumlah Belanja		0,00

- 2) Ditambah Realisasi Belanja Modal selain Peralatan dan Mesin pada LRA Tahun Anggaran 2024 yang menjadi BM Peralatan dan Mesin, yaitu berasal dari (dalam rupiah):

Kodering	Uraian	31 Desember 2024
5.2.01	BM Tanah	
5.2.03	BM Gedung dan Bangunan	
5.2.04	BM Jalan, Irigasi dan Jaringan	
5.2.05	BM Aset Tetap Lainnya	
5.2.06	BM Aset Lainnya	
Jumlah Belanja		

- 3) Dikurangi Realisasi Belanja Modal PM pada LRA Tahun Anggaran 2024 yang menjadi persediaan sebesar Rp0,00 .

- 4) Dikurangi Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada LRA Tahun Anggaran 2024 yang menjadi BM Jenis Aset Tetap Yang Lain, yaitu menjadi (dalam rupiah)

Kodering	Uraian	31 Desember 2024
5.2.3	BM Tanah	
5.2.3	BM Gedung dan Bangunan	
5.2.3	BM Jalan, Irigasi dan Jaringan	
5.2.3	BM Aset Tetap Lainnya	
5.2.3	BM Aset Lainnya	
5.2.3	Persediaan	
5.2.3	Aset Tak Berwujud	
Jumlah Belanja		

- 5) Dikurangi Realisasi Belanja Modal yang menjadi persediaan sebesar Rp0,00 .
- 6) Dikurangi Realisasi Belanja Modal yang Tidak Dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp0,00 .

Penambahan Peralatan dan Mesin tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan adanya realisasi belanja modal yang tidak dikapitalisasi menjadi Aset Tetap sebesar Rp0,00 dan terdapatnya penambahan Peralatan dan Mesin yang tidak dipengaruhi oleh belanja modal. Penambahan yang tidak dipengaruhi oleh belanja modal merupakan penambahan melalui transaksi mutase/hibah masuk dari kementerian.

5.2.2.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp31.680.378.048,00 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp31.664.471.748,00 Hal ini berarti Gedung dan Bangunan naik sebesar Rp15.906.300,00 atau 0,05 persen.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

No	Jenis	Saldo Akhir 2023	Saldo Awal 2024	Mutasi		Saldo Akhir 2024
				Tambah	Kurang	
1	Gedung Kantor	31.664.471.748,00	31.664.471.748,00	15.906.300,00	0,00	31.680.378.048,00
Jumlah		31.664.471.748,00	31.664.471.748,00	15.906.300,00	0,00	31.680.378.048,00

Mutasi/perubahan Gedung dan Bangunan tersebut adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Saldo Awal	
Penambahan:	
Realisasi Belanja Modal Yang Menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan (*)	628.319.296,00
Penerimaan dari OPD lain (Mutasi masuk antar OPD)	
Pengembangan (Kapitalisasi)	
Koreksi Pencatatan	
Reklasifikasi dari Persediaan, Jenis Aset Tetap Yang Lain, Akun Lainnya (Reklasifikasi Masuk)	
Reklasifikasi dari Jenis Persediaan (Reklasifikasi Masuk)	

Hibah/Pengakuan Penerimaan Lainnya Yang Sah	
Aset Tetap dari BTT	
Jumlah Penambahan	15.906.300,00
Pengurangan:	
Penghapusan	
Penyerahan Aset Tetap ke OPD Lain (Mutasi Keluar Antar OPD)	
Koreksi Pencatatan	
Reklasifikasi ke Persediaan, Jenis Aset Tetap Yang Lain, Akun Lainnya (Reklasifikasi Keluar)	
Reklasifikasi ke Persediaan (Reklasifikasi Keluar)	
Hibah/Pengakuan Pengeluaran Lainnya Yang Sah	
Hibah/Mutasi Keluar Aset Tetap dari BTT	
Jumlah Pengurangan	0,00
Jumlah Per 31 Desember 2024	31.680.378.048,00

(*) Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Sebesar Rp628.319.296,00 berasal dari:

1) Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada LRA Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Kodering	Uraian	31 Desember 2024
5.2.3	BM Gedung dan Bangunan	628.319.296,00
Jumlah Belanja		628.319.296,00

2) Ditambah Realisasi Belanja Modal selain Gedung dan Bangunan pada LRA Tahun Anggaran 2024 yang menjadi BM Gedung dan Bangunan, yaitu berasal dari (dalam rupiah):

Kodering	Uraian	31 Desember 2024
5.2.3	BM Tanah	
5.2.3	BM Peralatan dan Mesnin	
5.2.3	BM Jalan, Irigasi dan Jaringan	
5.2.3	BM Aset Tetap Lainnya	
5.2.3	BM Aset Lainnya	
Jumlah Belanja		

3) Dikurangi Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada LRA Tahun Anggaran 2024 yang menjadi persediaan sebesar Rp0,00 .

4) Dikurangi Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada LRA Tahun Anggaran 2024 yang menjadi BM Jenis Aset Tetap Yang Lain, yaitu menjadi (dalam rupiah):

Kodering	Uraian	31 Desember 2024
5.2.3	BM Tanah	
5.2.3	BM Peralatan dan Mesnin	
5.2.3	BM Jalan, Irigasi dan Jaringan	
5.2.3	BM Aset Tetap Lainnya	
5.2.3	BM Aset Lainnya	
5.2.3	Persediaan	

Kodering	Uraian	31 Desember 2024
5.2.3	Aset Tak Berwujud	
Jumlah Belanja		

- 5) Dikurangi Realisasi Belanja Modal yang menjadi persediaan sebesar Rp0,00 .
- 6) Dikurangi Realisasi Belanja Modal yang Tidak Dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp0,00 .

Penambahan Gedung dan Bangunan tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan adanya realisasi belanja modal yang tidak dikapitalisasi menjadi Aset Tetap sebesar Rp0,00 .

5.2.2.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp920.058.634,00 , sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp920.058.634,00 .

Hal ini berarti nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dibandingkan tahun 2023.

Rincian mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

No	Jenis	Saldo Akhir 2023	Saldo Awal 2024	Mutasi		Saldo Akhir 2024
				Tambah	Kurang	
1	Jalan, Irigasi dan Jaringan	920.058.634,00	920.058.634,00	0,00	0,00	920.058.634,00
Jumlah		920.058.634,00	920.058.634,00	0,00	0,00	920.058.634,00

5.2.2.2.5 Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp240.366.216,00 , sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp240.366.216,00 .

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

No	Jenis	Saldo Akhir 2023	Saldo Awal 2024	Mutasi		Saldo Akhir 2024
				Tambah	Kurang	
1	Aset Tetap Lainnya	240.366.216,00	240.366.216,00	0,00	0,00	240.366.216,00
Jumlah		240.366.216,00	240.366.216,00	0,00	0,00	240.366.216,00

5.2.2.2.6 Konstruksi dalam Pengerjaan

Nilai Kontruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 .

Rincian mutasi Kontruksi dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut (dalam rupiah) :

No	Jenis	Saldo Akhir 2023	Saldo Awal 2024	Mutasi		Saldo Akhir 2024
				Tambah	Kurang	
1	Peralatan dan Mesin					
2	Gedung dan Bangunan					
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan					
4	Aset Tetap Lainnya					
	Jumlah					

5.2.2.2.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan merupakan jumlah total akumulasi penyusutan dari Aset Tetap, yang terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; dan Aset Tetap Lainnya. Nilai Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024 sebesar (Rp39.933.029.799,00) sedangkan Per 31 Desember 2023 sebesar (Rp37.355.408.750,00). Hal ini Akumulasi Penyusutan berarti turun sebesar - Rp2.577.621.049,00 atau 6,90 persen.

Nilai Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024 sebesar (Rp39.933.029.799,00) dari Total Aset Tetap Tahun 2024 sebesar Rp36.165.093.272,00 .

Berikut rincian Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024 (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	17.413.905.091,00	16.267.523.426,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	21.784.973.832,00	20.399.737.396,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	627.791.876,00	581.788.928,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	106.359.000,00	106.359.000,00
Jumlah	39.933.029.799,00	37.355.408.750,00

5.2.2.3 Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp195.926.110,00 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp200.015.014,00 .

Aset Lainnya terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Tagihan Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
Tagihan Bagian Jangka Panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
Tagihan Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud	204.444.660,00	204.444.660,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	-8.518.550,00	-4.429.646,00
Aset Lain-Lain	4.618.755.331,00	4.618.755.331,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-4.618.755.331,00	-4.618.755.331,00
Jumlah	195.926.110,00	200.015.014,00

5.2.2.3.1 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp204.444.660,00 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp204.444.660,00 .

Rincian Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Goodwill	0,00	0,00
Lisensi dan Franchise	0,00	0,00
Hak Cipta	0,00	0,00
Hak Paten	0,00	0,00
Software	204.444.660,00	0,00
Kajian	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	204.444.660,00	204.444.660,00

5.2.2.3.2 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar (Rp8.518.550,00) sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp4.429.646,00) .

5.2.2.3.3 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.618.755.331,00 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.618.755.331,00 .

Aset Lain-lain terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Aset Tetap yang tidak digunakan untuk operasional pemerintahan, disebabkan dalam kondisi rusak berat dan tidak layak untuk dipergunakan (DIURAI JENIS ASETNYA)	4.618.755.331,00	4.618.755.331,00
Aset Tetap dalam Pengajuan Penghapusan		
Piutang Dalam Proses Penghapusan		
Jumlah	4.618.755.331,00	4.618.755.331,00

5.2.2.3.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar (Rp4.618.755.331,00) sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp4.618.755.331,00) .

5.2.2.4 Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp34.136.871,00 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp30.363.321,00 . Hal ini berarti naik sebesar Rp3.773.550,00 atau 12,43 persen.

Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp34.136.871,00 seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

5.2.2.4.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 sebesar Rp34.136.871,00 ,sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp30.363.321,00 . Hal ini berarti kewajiban jangka pendek naik sebesar Rp3.773.550,00 atau 12,43 persen.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Belanja	34.136.871,00	30.363.321,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	34.136.871,00	30.363.321,00

5.2.2.4.2 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan utang kepada pihak ketiga yang timbul dari pemotongan yang dilakukan oleh entitas dari kegiatan/transaksi yang dilakukan oleh entitas yang bersangkutan.

Jumlah Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 .

5.2.2.4.3 Pendapatan Diterima Dimuka

Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 .

5.2.2.4.4 Utang Belanja

Jumlah Utang Belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp34.136.871,00 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp30.363.321,00 . Hal ini berarti utang belanja tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen.

Utang Belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp34.136.871,00 tersebut merupakan belanja listrik, air, dan telepon.

5.2.2.4.5 Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 . Hal ini berarti Utang Jangka Pendek Lainnya tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2023.

5.2.2.5 Ekuitas

Ekuitas merupakan akun untuk menampung selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp36.538.851.580,00 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp37.333.085.844,00 . Hal ini berarti ekuitas turun sebesar -Rp794.234.264,00 atau -2,13 persen.

5.2.3 CATATAN PENTING LAINNYA

5.3 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1 PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL

Ringkasan Laporan Operasional tahun 2024 adalah sebagai berikut (disajikan dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Pendapatan-LO	6.404.000,00	499.154.533,00
Beban	73.545.424.492,00	100.484.671.296,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	-73.539.020.492,00	-99.985.516.763,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00
Pos Luar Biasa	0,00	0,00
Surplus/(Defisit)-LO	-73.539.020.492,00	-99.985.516.763,00

Jumlah Pendapatan-LO tahun 2024 sebesar Rp6.404.000,00 yang semuanya merupakan Pendapatan Asli Daerah-LO, terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp0,00 , Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp6.400.000,00 , Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan-LO sebesar Rp0,00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO sebesar Rp4.000,00 .

Jumlah Beban tahun 2024 sebesar Rp73.545.424.492,00 terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp22.466.700.772,00 , Beban Persediaan sebesar Rp4.891.443.804,00 , Beban Jasa sebesar Rp25.071.480.401,00 , Beban Pemeliharaan sebesar Rp2.907.842.971,00 , Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp14.637.966.285,00 , Beban Subsidi sebesar Rp0,00 , Beban Hibah sebesar Rp975.382.744,00 , Beban Bantuan Sosial sebesar Rp0,00 , Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp2.581.709.953,00 , Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp0,00 , Beban Transfer Rp0,00 dan Beban Lain-lain sebesar Rp12.897.562,00 . Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional tahun 2024 sebesar (Rp73.539.020.492,00)terdiri dari Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp0,00 , dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp0,00 . Pos Luar Biasa tahun 2024 sebesar Rp0,00 . Surplus/(Defisit)-LO tahun 2024 sebesar (Rp73.539.020.492,00)diperoleh dari Pendapatan-LO sebesar Rp6.404.000,00 dikurangi dengan Beban sebesar Rp73.545.424.492,00 ditambah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp0,00 dan Pos Luar Biasa sebesar Rp0,00 .

5.3.2 PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.2.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi

Pendapatan-LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD.

Realisasi Pendapatan-LO tahun 2024 sebesar Rp6.404.000,00 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Pendapatan-LO	6.404.000,00	499.154.533,00
Pendapatan Asli Daerah-LO	499.154.533,00	6.404.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer-LO	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	0,00	0,00

Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan-LO tahun 2023 sebesar Rp499.154.533,00, realisasi Pendapatan-LO menurun dibanding tahun 2023 sebesar (Rp492.750.533,00) atau -98,72persen.

5.3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2024 sebesar Rp6.404.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2023 sebesar Rp499.154.533,00, berarti realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO menurun sebesar (Rp492.750.533,00) atau -98,72persen dibandingkan dengan tahun 2023.

Rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Pendapatan Pajak Daerah-LO	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah-LO	6.400.000,00	33.610.000,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	4.000,00	465.544.533,00
Jumlah	6.404.000,00	499.154.533,00

5.3.2.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah Pendapatan yang diperoleh dari kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah tidak saja berasal dari transaksi penerimaan kas tetapi juga berasal dari transaksi penerbitan hak tagih pajak dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 Wajib Pajak belum memenuhi kewajibannya.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00 atau - persen dari total Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2024 sebesar Rp6.404.000,00 .

Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2023 sebesar Rp0,00 , berarti realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00persen dibanding tahun 2023.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO menurut jenis pajak adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun2023 (Audited)
PKB-LO	0,00	0,00
BBNKB-LO	0,00	0,00
PBBKB-LO	0,00	0,00
Pajak Air Permukaan-LO	0,00	0,00
Pajak Rokok-LO	0,00	0,00
Pajak Alat Berat- LO	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

5.3.2.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO adalah Pendapatan yang berasal dari Pungutan Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2024 adalah sebesar Rp6.400.000,00 atau 1,00 persen dari total Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2024 sebesar Rp6.404.000,00 .

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp33.610.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2024 menurun sebesar (Rp27.210.000,00)atau -80,96persen .

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO menurut jenis retribusi adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Retribusi Jasa Umum-LO	0,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha-LO	6.400.000,00	33.610.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu-LO	0,00	0,00
Jumlah	6.400.000,00	33.610.000,00

5.3.2.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

Akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pendapatan Pajak Daerah-LO, Pendapatan Retribusi Daerah-LO, maupun Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO tahun 2024 adalah sebesar Rp4.000,00 atau 0,00 persen dari total Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2024 sebesar Rp6.404.000,00 .

Apabila dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO tahun 2023 sebesar Rp465.544.533,00 , berarti realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO menurun sebesar (Rp465.540.533,00) atau -100,00 persen dibanding tahun 2023.

Rincian realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	0,00
Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	0,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	507.800.000,00
Hasil Kerja Sama Daerah-LO	0,00	0,00
Jasa Giro-LO	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	0,00	0,00
Pendapatan Bunga-LO	0,00	0,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	0,00	0,00

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	0,00	0,00
Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing-LO	0,00	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	0,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	4.000,00	61.200,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian-LO	0,00	0,00
Pendapatan dari BLUD-LO	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	0,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	0,00	0,00
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO	0,00	0,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	0,00	0,00
Pendapatan Konsesi Jasa	0,00	0,00
Jumlah	4.000,00	507.861.200,00

5.3.2.2 Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Realisasi Beban tahun 2024 adalah sebesar Rp73.545.424.492,00 terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Beban Pegawai	22.466.700.772,00	21.881.000.593,00
Beban Persediaan	4.891.443.804,00	37.739.516.054,00
Beban Jasa	25.071.480.401,00	21.382.572.365,00
Beban Pemeliharaan	2.907.842.971,00	2.149.917.639,00
Beban Perjalanan Dinas	14.637.966.285,00	10.647.748.708,00
Beban Subsidi	0,00	0,00
Beban Hibah	0,00	4.075.875.000,00
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.581.709.953,00	2.605.956.667,00
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Transfer	0,00	0,00
Beban Lain-lain	12.897.562,00	2.084.270,00
Jumlah	73.545.424.492,00	100.484.671.296,00

Berikut ini disajikan komposisi realisasi masing-masing jenis Beban terhadap realisasi total Beban:

5.3.2.2.1 Beban Pegawai

Realisasi Beban Pegawai tahun 2024 sebesar Rp22.466.700.772,00 apabila dibandingkan dengan Realisasi Beban pegawai tahun 2023 sebesar Rp21.881.000.593,00 , maka realisasi beban pegawai meningkat sebesar Rp585.700.179,00 atau 2,68persen.

Rincian Objek Beban Pegawai adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	6.545.743.544,00	6.277.781.759,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	15.125.881.647,00	14.896.454.917,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	795.075.581,00	706.763.917,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	0,00	0,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	0,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	0,00	0,00
Beban Gaji dan Tunjangan MRP	0,00	0,00
Beban Pegawai BOS	0,00	0,00
Beban Pegawai BOSP	0,00	0,00
Beban Pegawai BLUD	0,00	0,00
Jumlah	22.466.700.772,00	21.881.000.593,00

5.3.2.2.2 Beban Persediaan

Realisasi Beban Persediaan tahun 2024 adalah sebesar Rp4.891.443.804,00 , Apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Persediaan tahun 2023 sebesar Rp37.739.516.054,00 , berarti realisasi Beban Persediaan sebesar menurun sebesar (Rp32.848.072.250,00)atau - 87,04persen dibanding tahun 2023.

Rincian Objek Beban Persediaan adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Beban Barang Pakai Habis	4.891.443.804,00	4.166.516.054,00
Beban Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00
Beban Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00
Beban Uang/Barang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	33.573.000.000,00
Jumlah	4.891.443.804,00	37.739.516.054,00

5.3.2.2.3 Beban Jasa

Realisasi Beban Jasa tahun 2024 adalah sebesar Rp25.071.480.401,00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Jasa tahun 2023 sebesar Rp21.382.572.365,00 , berarti realisasi Beban Jasa meningkat sebesar Rp3.688.908.036,00 atau 17,25persen dibanding tahun 2023.

Rincian Objek Beban Jasa adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Beban Jasa Kantor	6.545.743.544,00	6.277.781.759,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	15.125.881.647,00	14.896.454.917,00
Beban Sewa Tanah	795.075.581,00	706.763.917,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	0,00
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	22.466.700.772,00	21.881.000.593,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.697.352.437,00	0,00
Jumlah	316.983.050,00	0,00

5.3.2.2.4 Beban Pemeliharaan

Realisasi Beban Pemeliharaan tahun 2024 adalah sebesar Rp2.907.842.971,00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Pemeliharaan tahun 2023 sebesar Rp2.149.917.639,00 ,

berarti realisasi Beban Pemeliharaan meningkat sebesar Rp757.925.332,00 atau 35,25persen dibanding tahun 2023.

Rincian Objek Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	193.736.038,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	653.113.186,00	1.006.904.824,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.186.989.785,00	802.277.027,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	67.740.000,00	146.999.750,00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Jumlah	0,00	2.149.917.639,00

5.3.2.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Realisasi Beban Perjalanan Dinas tahun 2024 adalah sebesar Rp14.637.966.285,00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Perjalanan Dinas tahun 2023 sebesar Rp10.647.748.708,00 , berarti realisasi Beban Perjalanan Dinas meningkat sebesar Rp3.990.217.577,00 atau 37,47persen dibanding tahun 2023.

Rincian realisasi Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.496.244.445,00	10.474.130.308,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	141.721.840,00	173.618.400,00
Jumlah	14.637.966.285,00	10.647.748.708,00

5.3.2.2.6 Beban Subsidi

Realisasi Beban Subsidi tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Subsidi tahun 2023 sebesar Rp0,00 , berarti realisasi Beban Subsidi tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen disbanding tahun 2023.

Rincian Objeck Beban Subsidi adalah sebagai berikut (dalam rupiah) :

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Belanja Subsidi kepada BUMN	0,00	0,00
Belanja Subsidi kepada BUMD	0,00	0,00
Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	0,00	0,00
Belanja Subsidi kepada Koperasi	0,00	0,00

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Jumlah	0,00	0,00

5.3.2.2.7 Beban Hibah

Realisasi Beban Hibah tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Hibah tahun 2023 sebesar Rp0,00 , berarti realisasi Beban Hibah tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dibanding tahun 2023.

Rincian Objek Beban Hibah adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Belanja Hibah kepada BUMN	0,00	0,00
Belanja Hibah kepada BUMD	0,00	0,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	975.382.744,00	4.075.875.000,00
Belanja Hibah Dana BOS	0,00	0,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00	0,00
Jumlah	975.382.744,00	4.075.875.000,00

5.3.2.2.8 Beban Bantuan Sosial

Realisasi Beban Bantuan Sosial tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Bantuan Sosial tahun 2023 sebesar Rp0,00 , berarti realisasi Beban Bantuan Sosial tidak mengalami perubahan sebesar tidak mengalami perubahan atau 0,00 persen dibanding tahun 2023.

Rincian Objek Beban Bantuan Sosial adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

5.3.2.2.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2024 adalah sebesar Rp2.581.709.953,00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2023 sebesar Rp2.605.956.667,00 , berarti realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi menurun sebesar

(Rp24.246.714,00) atau -0,93 persen dibanding tahun 2023.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

No	Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
I	Beban Penyusutan		
1.	Peralatan dan Mesin	1.146.381.665,00	1.171.158.595,00
2.	Gedung dan Bangunan	1.385.236.436,00	1.384.706.220,00
3.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	46.002.948,00	46.002.948,00
4.	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
5.	Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
6.	Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	0,00	0,00
7.	Aset Konsesi Jasa	0,00	0,00
8.	Properti Investasi	0,00	0,00
	Jumlah Beban Penyusutan	2.577.621.049,00	2.601.867.763,00
II	Beban Amortisasi		
	Aset Tidak Berwujud	4.088.904,00	4.088.904,00
	Jumlah Beban Amortisasi	4.088.904,00	4.088.904,00
	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.581.709.953,00	2.605.956.667,00

5.3.2.2.10 Beban Penyisihan Piutang

Realisasi Beban Penyisihan Piutang tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Penyisihan Piutang tahun 2023 sebesar Rp0,00, berarti realisasi Beban Penyisihan Piutang sebesar tidak mengalami perubahan atau 0,00 persen.

Rincian Beban Penyisihan Piutang adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

No	Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
I	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan		
1.	Beban Penyisihan Piutang Pajak	0,00	0,00
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	0,00
3.	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang SAH	0,00	0,00
4.	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	0,00	0,00
II	Beban Penyisihan Piutang Lainnya		
1.	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	0	0

No	Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
2.	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0	0
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Pendapatan		0	0
Jumlah Beban Penyisihan Piutang		0,00	0,00

5.3.2.2.11 Beban Lain-lain

Realisasi Beban Lain-lain tahun 2024 adalah sebesar Rp12.897.562,00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Lain-lain tahun 2023 sebesar Rp2.084.270,00 , berarti realisasi Beban Lain-lain meningkat sebesar Rp10.813.292,00 atau 518,80persen.

Rincian Objek Beban Lain-lain adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	12.897.562,00	0,00
Beban Tidak Terduga	0,00	0,00
Jumlah	12.897.562,00	0,00

5.3.2.3 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

Berdasarkan realisasi Pendapatan-LO dan realisasi Beban tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional tahun 2023 adalah sebesar (Rp73.539.020.492,00)dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Pendapatan-LO	6.404.000,00	499.154.533,00
Beban	73.545.424.492,00	100.484.671.296,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	-73.539.020.492,00	-99.985.516.763,00

5.3.2.4 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2024 sebesar Rp0,00 berasal dari Surplus Non Operasional sebesar Rp0,00 dan Defisit Operasional sebesar Rp0,00 .

5.3.2.4.1 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Realisasi Surplus dari Kegiatan Non Operasional tahun 2024 sebesar Rp0,00 yang terdiri dari (dalam rupiah) :

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

5.3.2.4.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2024 direalisasikan sebesar Rp0,00 yang terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

5.3.2.3 Surplus/(Defisit) sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/(Defisit) sebelum Pos Luar Biasa adalah penjumlahan antara Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional, dan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional. Dari realisasi Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional tahun 2024 sebesar (Rp73.539.020.492,00) dan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional tahun 2024 sebesar Rp0,00, maka realisasi Surplus/(Defisit) sebelum Pos Luar Biasa tahun 2024 yaitu sebesar Rp0,00.

5.3.2.4 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan akun untuk menyajikan pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan rutin atau sering terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Untuk tahun 2024 tidak terdapat realisasi untuk Pos Luar Biasa.

5.3.2.5 Surplus/(Defisit)-LO

Surplus/(Defisit)-LO adalah penjumlahan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional, Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional, dan Pos Luar Biasa. Realisasi Surplus/(Defisit)-LO tahun 2024 sebesar (Rp73.539.020.492,00), berasal dari (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Pendapatan-LO	6.404.000,00	499.154.533,00

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Beban	73.545.424.492,00	100.484.671.296,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	-73.539.020.492,00	-99.985.516.763,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00
Pos Luar Biasa	0,00	0,00
Surplus/(Defisit)-LO	-73.539.020.492,00	-99.985.516.763,00

5.3.3 CATATAN PENTING LAINNYA

-

5.4.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**5.4.2 PENJELASAN UMUM LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

- a) Ekuitas Awal;
- b) Surplus/Defisit-LO pada Periode bersangkutan;
- c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan
- d) Koreksi kesalahan mendasar, seperti:
 - (1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
 - (2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- e) Ekuitas Akhir

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut (disajikan dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Tahun Anggaran 2023 (Audited)
Ekuitas Awal	37.333.085.844,00	37.029.323.596,00
Surplus/(Defisit)-LO	-73.539.020.492,00	-99.985.516.763,00
RK PPKD	72.744.786.228,00	100.189.942.520,00
RA PPKD (Nilai Perolehan)	0,00	-274.010.000,00
RA PPKD (Akumulasi Penyusutan)	0,00	274.010.000,00
Ekuitas	0,00	99.336.491,00
Ekuitas Akhir	36.538.851.580,00	37.333.085.844,00

Ekuitas Akhir Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp36.538.851.580,00 terdiri dari:

1. Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp37.333.085.844,00 .
2. Surplus/Defisit-LO Tahun Anggaran 2024 sebesar (Rp73.539.020.492,00).
3. RK PPKD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp72.744.786.228,00 .
4. RA PPKD (Nilai Perolehan) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 .

5. RA PPKD (Akumulasi Penyusutan) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 .
6. Ekuitas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 .
7. Ekuitas Akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp36.538.851.580,00 .

5.4.3 PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.4.3.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp37.333.085.844,00 . Nilai ini merupakan Ekuitas Akhir dari Ekuitas Tahun Anggaran 2023 Audited.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp37.029.323.596,00 , berarti realisasi Ekuitas Awal meningkat sebesar Rp303.762.248,00 atau 0,82persen dibanding Tahun Anggaran 2023.

5.4.3.2 Surplus/(Defisit)-LO

Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2024 sebesar (Rp73.539.020.492,00). Akun ini dihasilkan dari transaksi menutup akun Surplus/(Defisit)-LO.

Surplus/Defisit-LO Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Tahun Anggaran 2024 sebesar (Rp73.539.020.492,00). Sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp99.985.516.763,00). Hal ini berarti Apabila dibandingkan dengan Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2024 Surplus/(Defisit)-LO Dinas Koperasi dan Usaha Kecil meningkat sebesar Rp26.446.496.271,00 atau -26,45 persen dibanding Tahun Anggaran 2023.

5.4.3.3 RK PPKD

RK PPKD adalah nilai yang menunjukkan transaksi kas antar entitas (PPKD dan OPD. RK PPKD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp72.744.786.228,00 .

5.4.3.4 RA PPKD

RA PPKD adalah nilai yang menunjukkan transaksi aset tetap antar entitas (PPKD dan OPD). Saldo RA PPKD (Nilai Perolehan) Tahun 2024 terdiri atas penerimaan/mutasi masuk barang dan pengeluaran/mutasi keluar barang sebesar Rp0,00 serta Saldo RA PPKD (Akumulasi Penyusutan) yang berupa nilai akumulasi penyusutan dari nilai aset tersebut sebesar Rp0,00

5.4.3.5 Ekuitas

Akun ekuitas menunjukkan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas.

Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Tahun Anggaran 2023 (Audited)
Koreksi Saldo Awal Kas		
Kas Lainnya (BLUD)		
Koreksi Setoran Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Lalu		
Koreksi Setoran Kas di BP Tahun Lalu		
Koreksi Piutang		
Koreksi Penyisihan Piutang		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Koreksi Nilai Persediaan		
Koreksi Investasi Permanen		
Koreksi Kemitraan Pihak Ketiga		
Koreksi Bagian Lancar Piutang Sewa		
Koreksi Bagian Lancar Piutang TPA		
Koreksi Bagian Lancar Piutang TGR		
Koreksi KDP		
Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka		
Koreksi Pencatatan Penyertaan Modal Daerah		
Koreksi Nilai Aset Tetap		
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Koreksi Nilai Aset Tak Berwujud		
Koreksi Nilai Aset Lain-Lain		
Koreksi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
Koreksi Penyusutan Aset Lain-Lain		
Koreksi Kewajiban		
Koreksi Utang Belanja		
Koreksi Lain-Lain PAD Yang Sah		
Koreksi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		
Koreksi Beban Barang Dan Jasa		
Koreksi Nilai Ekstrakomtabel		
Lain - Lain		
Pembayaran Piutang Bagian Lancar TGR		

Uraian	Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Tahun Anggaran 2023 (Audited)
Pembayaran Piutang Lain-Lain		
Jumlah	0,00	99.336.491,00

Koreksi ekuitas ini disebabkan oleh :

5.4.3.6 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp36.538.851.580,00 . Nilai Ekuitas ini merupakan nilai yang disajikan sebagai akun Ekuitas di Neraca per 31 Desember 2024.

Hal ini Apabila dibandingkan dengan Ekuitas Akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp37.333.085.844,00 , Ekuitas Akhir Dinas Koperasi dan Usaha Kecil menurun sebesar (Rp794.234.264,00) atau -2,13 persen dibanding Tahun Anggaran 2024.

5.4.4 CATATAN PENTING LAINNYA

-

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON-KEUANGAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL

6.1 DOMISILI

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No 705 , Kota Bandung.

6.2 DASAR HUKUM LANDASAN OPERASIONAL

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil melaksanakan kegiatan operasionalnya di bidang koperasi dan usaha kecil berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

6.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil . Tugas pokok Dinas Koperasi dan Usaha Kecil adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidanga koperasi dan usaha kecil, meliputi kelembagaan koperasi, pemberdayaan koperasi, usaha kecil serta pengawasasn dan pemeriksaan koperasi yang menjadi kewenangan provinsi serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil mempunyai fungsi sebagai berikut :

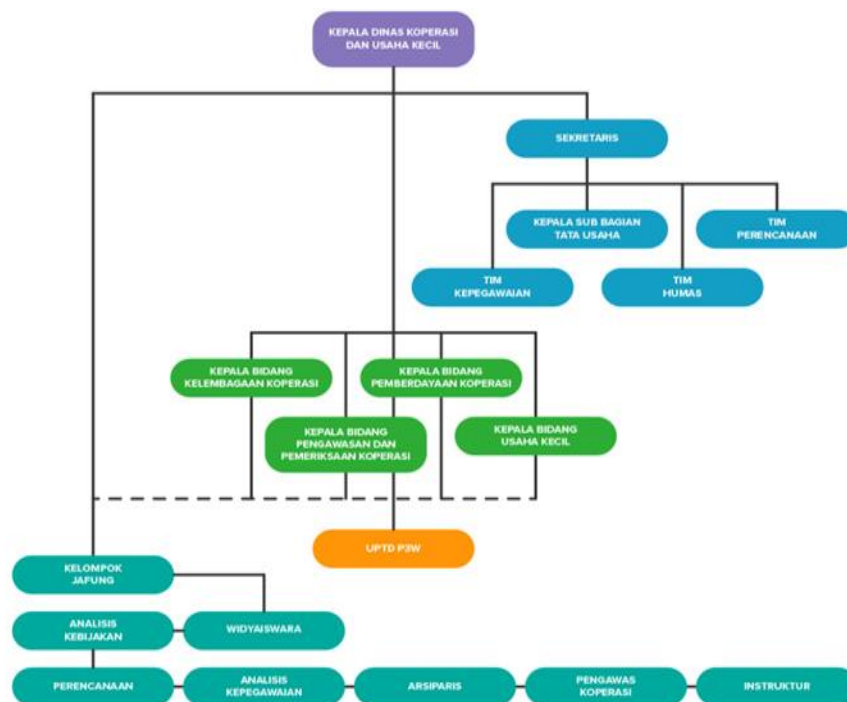
- Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha kecil yang menjadi kewenangan Provinsi;
- Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan, dan pengendalian koperasi dan usaha kecil yang menjadi kewenangan daerah Provinsi;
- Penyelenggaraan administrasi dinas
- Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dinas ; dan
- Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

6.4 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

Provinsi Jawa Barat




BAB VII**PENUTUP**

Dari uraian diatas dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Neraca Dinas Koperasi dan Usaha Kecil per 31 Desember 2024 menunjukkan jumlah Aset sebesar Rp36.572.988.451,00 Kewajiban sebesar Rp34.136.871,00 dan Ekuitas sebesar Rp36.538.851.580,00 ;
2. Realisasi APBD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Tahun Anggaran 2024 menunjukkan Pendapatan-LRA berjumlah Rp6.404.000,00 atau 1,90 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp337.700.000,00 dan realisasi Belanja Daerah sebesar Rp72.751.190.228,00 atau 89,09 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp81.659.575.204,00 . Dengan demikian, terdapat (Defisit)-LRA antara Pendapatan-LRA dan Belanja sebesar (Rp72.744.786.228,00);
3. Pada Laporan Operasional Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Tahun Anggaran 2024 terdapat Pendapatan-LO sebesar Rp6.404.000,00 , Beban sebesar Rp73.545.424.492,00 dan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp0,00 sehingga (Defisit)-LO sebesar (Rp73.539.020.492,00);
4. Ekuitas Awal pada Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp37.333.085.844,00 dan Ekuitas Akhir sebesar Rp36.538.851.580,00 .

Bandung, 23 Mei 2025

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil



Yuke Mauliani Septina, ST., M.Si.
Pembina Utama Muda

NIP. 197409261998032005

LAMPIRAN